



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR PR.00/KEP-582/K/SU/2023
TENTANG
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN TAHUN 2024

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasan intern yang bersifat strategis dan menjadi perhatian Presiden serta para pemangku kepentingan, perlu disusun Agenda Prioritas Pengawasan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan nasional pengawasan intern;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Agenda Prioritas Pengawasan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);

5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1422) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 450);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Agenda Prioritas Pengawasan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut APP Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : APP Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- KETIGA : APP Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024.
- KEEMPAT : APP Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA meliputi:
1. Sektor Strategis Pemerintah yang terdiri dari 7 (tujuh) sektor;
 2. Tema Pengawasan Strategis yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) tema; dan
 3. Topik Prioritas yang terdiri dari 87 (delapan puluh tujuh) topik.
- KELIMA : Informasi hasil pengawasan, sektor, tema, dan topik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bersifat minimal dan dapat disesuaikan dengan perkembangan Agenda Prioritas Pemerintah.
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2023

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

MUHAMMAD YUSUF ATEH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR PR.00/KEP-582/K/SU/2023
TENTANG
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN TAHUN
2024

AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN TAHUN 2024

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
A	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas	Triwulan II dan IV: 1. Gambaran kualitas dan produktivitas SDM Indonesia (unggul, daya saing, dan inklusif) 2. Analisis <i>progress grand design</i> pembangunan SDM di Indonesia 3. Analisis efektivitas bauran kebijakan pembangunan SDM di Indonesia	D2		V		V
A.1	Pendidikan	1. Gambaran atas kualitas dan akses pendidikan di Indonesia pada semua jenjang pendidikan 2. Gambaran keselarasan dan kecukupan intervensi pemerintah (K/L/D) bidang pendidikan 3. Analisis efektivitas program bidang pendidikan dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja 4. Analisis isu kewilayahan pembangunan SDM di Indonesia	D2		V		V
A.1.a	Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Dasar dan Menengah	Triwulan II: 1. Gambaran sebaran aksesibilitas (termasuk Anak Tidak Sekolah (ATS)) dan kualitas pendidikan dasar dan	D2		V	V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendai PJ	TRIWULAN			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
	<p>menengah</p> <p>2. Analisis kualitas guru, sarpras, kurikulum dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guru (peningkatan kualitas dan distribusi) - Sarana dan Prasarana (peningkatan kualitas dan pemenuhan standar, terutama untuk daerah 3T) - Kurikulum (efektivitas kurikulum dalam peningkatan skor AN dan PISA) <p>3. Akuntabilitas keuangan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah</p> <p>4. Akuntabilitas dan ketepatan bantuan pendidikan dasar dan menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Indonesia Pintar - Bantuan Operasional Sekolah, dan - Bantuan Pendidikan Lainnya <p>5. Analisis efektivitas Program Penguatan Pendidikan Karakter (anti narkoba, anti korupsi, dan anti terorisme)</p> <ul style="list-style-type: none"> - kecukupan dan keselarasan kebijakan terkait penguatan pendidikan karakter - kecukupan materi penguatan pendidikan karakter dalam kurikulum - efektivitas program penguatan pendidikan karakter - saran/rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi <p>6. Hambatan dan permasalahan</p> <p>7. Saran dan Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi</p>					

SEKTOR/TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Liputan Khusus:</p> <p>1. Efektivitas zonasi PPDB</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas sekolah secara kewilayahan; - Jumlah calon siswa di masing-masing wilayah; - Analisis tata kelola mekanisme PPDB (prestasi, afirmasi, dan seterusnya) <p>Triwulan III:</p> <p>1. Analisis ketepatan, kecukupan, dan keselarasan desain kebijakan peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dasar dan menengah</p> <p>2. Analisis efektivitas Program Penguatan Pendidikan Karakter (anti narkoba, anti korupsi, dan anti terorisme)</p> <ul style="list-style-type: none"> - kecukupan dan keselarasan kebijakan terkait penguatan pendidikan karakter - kecukupan materi penguatan pendidikan karakter dalam kurikulum - efektivitas program penguatan pendidikan karakter - saran/rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi <p>3. Analisis efektivitas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dalam menyiapkan SDM yang berkualitas</p> <p>4. Analisis tata kelola penyelenggaraan digitalisasi di jenjang pendidikan dasar dan menengah</p> <p>5. Hambatan dan permasalahan</p> <p>6. Saran dan Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi</p>					

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
1	2	3	4	5	6	7	
A.1.b	Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Tinggi	<p>Triwulan II:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gambaran sebaran aksesibilitas dan kualitas pendidikan tinggi, dari sisi perguruan tinggi dan mahasiswa 2. Akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi <ul style="list-style-type: none"> - sarana prasarana (pemenuhan standar) - kurikulum (ketepatan dalam menjawab lapangan kerja) - dosen (kualitas dan pemerataan) - UKT (ketepatan penetapan) 3. Akuntabilitas dan ketepatan bantuan pendidikan tinggi 4. Analisis produk perguruan tinggi dalam mendukung hilirisasi industri 5. Analisis tata kelola penyelenggaraan digitalisasi di jenjang pendidikan tinggi 6. Akuntabilitas dan efektivitas kerjasama Internasional Bidang Pendidikan Tinggi 7. Hambatan dan permasalahan 8. Saran dan Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi <p>Triwulan III:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gambaran sebaran aksesibilitas dan kualitas pendidikan tinggi, dari sisi perguruan tinggi dan mahasiswa 2. Analisis ketepatan dan kecukupan desain kebijakan: <ul style="list-style-type: none"> - peningkatan akses pendidikan tinggi - peningkatan kualitas pendidikan tinggi secara nasional maupun internasional 	D2		V	V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		3. Akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi <ul style="list-style-type: none"> - sarana prasarana (pemenuhan standar) - kurikulum (ketepatan dalam menjawab lapangan kerja) - dosen (kualitas dan pemerataan) - UKT (ketepatan penetapan) 4. Akuntabilitas dan ketepatan bantuan pendidikan tinggi 5. Analisis relevansi program pendidikan tinggi dengan potensi dan kebutuhan per daerah 6. Analisis produk perguruan tinggi dalam mendukung hilirisasi industri 7. Analisis tata kelola penyelenggaraan digitalisasi di jenjang pendidikan tinggi 8. Akuntabilitas dan efektivitas kerjasama Internasional Bidang Pendidikan Tinggi 9. Hambatan dan permasalahan 10. Saran dan Rekomendasi perbaikan kebijakan/ implementasi					
A.1.c	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Triwulan II: 1. Gambaran kebutuhan dan proyeksi tenaga kerja per sektor per daerah 2. Gambaran jumlah, sebaran, dan kualitas lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi per sektor 3. Gambaran program dan pendanaan K/L/D dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi 4. Analisis pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar, sarpras dan kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja 5. Analisis jumlah dan sebaran lulusan pendidikan dan	D2		V	V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		<p>pelatihan vokasi dengan ketersediaan lapangan kerja per sektor</p> <p>Triwulan III:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis keselarasan, kecukupan dan ketepatan kebijakan pendidikan dan pelatihan vokasi 2. Akuntabilitas dan efektivitas kerjasama Internasional Bidang Pendidikan Vokasi 3. Analisis pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar, sarpras dan kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja 4. Analisis jumlah dan sebaran lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan ketersediaan lapangan kerja per sektor 5. Analisis tata kelola penyelenggaraan digitalisasi pendidikan di jenjang pendidikan dan pelatihan vokasi 6. Hambatan dan permasalahan 7. Saran dan Rekomendasi perbaikan kebijakan/ implementasi 					
A.2	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis efektivitas intervensi pemerintah dalam penanganan <i>stunting</i> 2. Gambaran atas aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan nasional 3. Analisis atas kesetaraan perlakuan mendapatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat 4. Gambaran keselarasan dan kecukupan intervensi pemerintah (K/L/D) bidang kesehatan 5. Analisis efektivitas program bidang kesehatan dalam meningkatkan kualitas kehidupan yang sehat dan 	D2		V		V

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		produktif					
A.2.a	Akselerasi Penurunan <i>Stunting</i>	<p>Triwulan II:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gambaran sebaran angka prevalensi <i>stunting</i> 2. Analisis implementasi Program Penurunan Program <i>Stunting</i>, meliputi intervensi: <ul style="list-style-type: none"> - ketahanan pangan dan gizi - lingkungan kesehatan - lingkungan sosial ekonomi - lingkungan pemukiman 3. Analisis efektivitas program dalam penurunan prevalensi <i>stunting</i> 4. Hambatan dan permasalahan 5. Saran dan Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi <p>Triwulan III:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gambaran sebaran angka prevalensi <i>stunting</i> 2. Analisis ketepatan dan konvergensi Kebijakan untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> 3. Analisis keselarasan kebijakan percepatan penurunan <i>stunting</i> antar K/L/D 4. Analisa tata kelola data keluarga risiko <i>stunting</i> dan integrasi dengan program intervensi lainnya 5. Analisis implementasi Program Penurunan Program <i>Stunting</i>, meliputi intervensi: <ul style="list-style-type: none"> - ketahanan pangan dan gizi - lingkungan kesehatan - lingkungan sosial ekonomi - lingkungan pemukiman 	D2		V	V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		6. Analisis efektivitas program dalam penurunan prevalensi <i>stunting</i> 7. Hambatan dan permasalahan 8. Saran dan Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi					
A.2.b	Transformasi Pembiayaan Kesehatan	Triwulan I: 1. Gambaran sebaran capaian <i>Universal Health Care (UHC)</i> 2. Ketepatan basis data peserta Jaminan Kesehatan Nasional 3. Analisis kebijakan penerapan tarif JKN (kecukupan tarif INA CBG dan Non INA CBG dalam penyelenggaraan layanan kesehatan) 4. Sustainability pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional: - Tata kelola collecting iuran program Jaminan Kesehatan Nasional - Tata kelola klaim pasien - Tata kelola investasi dana 5. Hambatan dan permasalahan 6. Saran dan Rekomendasi perbaikan kebijakan/ implementasi Triwulan III: 1. Gambaran sebaran capaian UHC 2. Analisis koordinasi antar K/L/D dalam pencapaian UHC 3. Analisis kecukupan dan ketepatan design kebijakan pemerintah pusat dan daerah mencapai UHC 4. Ketepatan basis data peserta Jaminan Kesehatan Nasional	D2	V		V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		5. Analisis kebijakan penerapan tarif JKN (kecukupan tarif INA CBG dan Non INA CBG dalam penyelenggaraan layanan kesehatan) 6. Sustainability pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional: - Tata kelola <i>collecting</i> iuran program Jaminan Kesehatan Nasional - Tata kelola klaim pasien - Tata kelola investasi dana 7. Hambatan dan permasalahan 8. Saran dan Rekomendasi perbaikan kebijakan/ implementasi					
A.2.c	Transformasi layanan primer	Triwulan I: 1. Gambaran sebaran dan kualitas fasilitas kesehatan tingkat primer 2. Analisis ketepatan dan kecukupan kebijakan dalam meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan primer 3. Analisis bauran kebijakan K/L/D dalam meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan primer 4. Analisis tata kelola penyelenggaraan layanan kesehatan primer: - tenaga kesehatan - obat - sarana prasarana - beban administrasi layanan kesehatan 5. Akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan layanan primer kesehatan (dana kapitasi dan non kapitasi FKTP) 6. Analisis ketersediaan alokasi anggaran untuk kegiatan	D2	V			

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
1	2	3	4	5	6	7	
		Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat 7. Hambatan dan permasalahan 8. Saran dan Rekomendasi perbaikan kebijakan/ implementasi					
A.2.d	Transformasi layanan rujukan	Triwulan I: 1. Gambaran sebaran dan kualitas fasilitas kesehatan tingkat lanjutan 2. Analisis ketepatan dan kecukupan kebijakan dalam meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan lanjutan 3. Analisis bauran kebijakan K/L/D dalam meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan lanjutan 4. Analisis tata kelola penyelenggaraan layanan kesehatan lanjutan: - tenaga Kesehatan - obat - sarana prasarana 5. Analisis kesetaraan kualitas atas layanan kesehatan rujukan bagi pasien. Terutama waktu tunggu mendapatkan layanan kesehatan 6. Analisis persiapan pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) 7. Analisis keberlanjutan rumah sakit (<i>cost efficiency</i> , kelancaran klaim dan sebagainya) 8. Hambatan dan permasalahan 9. Saran dan Rekomendasi perbaikan kebijakan/ implementasi	D2	V			
A.2.e	Transformasi Sumber Daya Manusia	Triwulan I: 1. Analisis ketepatan Kebijakan Program Pengembangan	D2	V			

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
1	2	3	I	II	III	IV	
			4	5	6	7	
	Kesehatan	Kompetensi dan Program Distribusi Tenaga Kesehatan; 2. Analisis kesesuaian dan keselarasan kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait pemerataan tenaga kesehatan; 3. Analisis implementasi atas peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan, termasuk daerah 3T 4. Akuntabilitas insentif tenaga kesehatan pusat dan daerah 5. Analisis dampak atas UU Kesehatan atas implementasi <i>Academic Health System</i> 6. Analisis implementasi dan kontribusi program adaptasi dokter spesialis WNI Lulusan Luar Negeri 7. Hambatan dan permasalahan 8. Saran dan Rekomendasi perbaikan kebijakan/ implementasi					
A.2.f	Tata Kelola Obat Publik	Triwulan I: 1. Analisis kebijakan tentang tata kelola dan keamanan obat 2. Analisis perencanaan penyediaan obat di level nasional dan daerah 3. Analisis tata kelola penyediaan obat, meliputi: - produksi dalam negeri (bahan baku sampai jadi) - impor (bahan baku sampai jadi) - distribusi dan logistik - pemusnahan 4. Analisis pemenuhan standarisasi keamanan obat dalam pemberian izin 5. Analisis efektivitas pengawasan produksi obat (CPOB) 6. Analisis keterjangkauan obat dan penetapan harga	D2	V			

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		7. Hambatan dan permasalahan 8. Saran dan Rekomendasi perbaikan kebijakan/ implementasi					
A.2.g	Transformasi Teknologi Kesehatan	Triwulan II: 1. Analisis Kebijakan strategi transformasi digital kesehatan 2. Progres pembangunan infrastruktur untuk mendorong transformasi digital kesehatan 3. Akuntabilitas alokasi anggaran pusat dan daerah untuk mendukung penguatan inovasi dan teknologi kesehatan; 4. Kesiapan tenaga kesehatan untuk transformasi digital; 5. Progres Integrasi dan Pengembangan Sistem Data Kesehatan 6. Efektivitas transformasi teknologi kesehatan dalam rangka menyederhanakan dan mempermudah akses kesehatan 7. Hambatan dan permasalahan 8. Saran dan Rekomendasi perbaikan kebijakan/ implementasi	D2		V		
A.2.h	Penguatan Sistem Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular (Penyakit Prioritas)	Triwulan III: 1. Penguatan Sistem Pengendalian Penyakit secara Preventif: - Analisis Desain Kebijakan Sistem Pengendalian Penyakit - Analisis Program Surveilans dan Deteksi Dini Penyakit Infeksi - Analisis Kecukupan dan Ketersediaan Sarana Pendukung Surveilans dan Laboratorium - Analisis Kecukupan dan Ketersediaan Obat dan	D2			V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		<p>Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analisis Kecukupan Vaksin Imunisasi Rutin Dasar dan Lanjutan - Analisis implementasi penyelenggaraan GERMAS - Hambatan dan permasalahan - Saran dan Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi <p>2. Penguatan Sistem Pengendalian Penyakit secara Represif untuk penyakit menular dan tidak menular (HIV/AIDS, <i>Tuberculosis</i> (TBC), Malaria, Kusta, dan <i>Schistosomiasis</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analisis efektifitas program pengendalian penyakit menular dan tidak menular - Analisis akuntabilitas pengelolaan dana dan logistik (perencanaan, pengadaan, pendistribusian, dan penggunaannya) - Analisis kecukupan sarana prasarana, alkes, obat, dan tenaga kesehatan - Hambatan dan permasalahan - Saran dan Rekomendasi perbaikan kebijakan/ implementasi 					
A.3	Kesejahteraan Sosial		D2		V		V
A.3.a	Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	<p>Triwulan II:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis ketepatan intervensi program 2. Analisis keselarasan, kesesuaian dan konvergensi program antar K/L/D 3. Analisis atas alokasi dan komposisi anggaran pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan 	D2		V		

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		ekstrem 4. Akuntabilitas dan implementasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. 5. Analisis mekanisme graduasi masyarakat miskin ekstrem 6. Analisis efektivitas program pengentasan kemiskinan ekstrem 7. Hambatan dan permasalahan 8. Saran dan Rekomendasi perbaikan kebijakan/ implementasi					
A.3.b	Tata Kelola Data Kesejahteraan Sosial	Triwulan II dan IV: 1. Analisis atas kebijakan dan desain pengembangan Basis Data Pensasaran Program dalam rangka Kesejahteraan Sosial termasuk kemiskinan ekstrem 2. Analisis keterkaitan, integrasi, serta interoperabilitas data kesejahteraan sosial (Regsosek, DTKS, P3KE, dll) 3. Progres capaian pelaksanaan registrasi sosial ekonomi 4. Akuntabilitas dan tata kelola pengembangan basis data pensasaran program dalam rangka Kesejahteraan Sosial 5. Kesiapan infrastruktur sistem dan sarana prasarana basis data 6. Hambatan dan permasalahan 7. Saran dan Rekomendasi perbaikan kebijakan/ implementasi	D2		V		V
A.3.c	Perlindungan Sosial Sepanjang Hayat	Triwulan III: 1. Analisis atas ketepatan dan kecukupan desain kebijakan skema perlindungan sosial sepanjang hayat 2. Analisis atas konvergensi dan komplementaritas antar program dalam skema perlindungan sosial sepanjang	D2			V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		hayat 3. Analisis ketepatan sasaran penerima program perlindungan sosial sepanjang hayat 4. Akuntabilitas penyelenggaraan program perlindungan sosial sepanjang hayat - keselarasan perencanaan dan penganggaran - tata kelola dan kelembagaan antar program - <i>monitoring</i> kesinambungan antar program - efektivitas penyelenggaraan 5. Gambaran kemampuan dan kecukupan jangkauan skema perlinsos sepanjang hayat 6. Analisis atas kemampuan, keberlanjutan serta inovasi skema pendanaan perlindungan sosial sepanjang hayat 7. Analisis atas kesiapan <i>platform</i> penyaluran perlindungan sosial sepanjang hayat 8. Analisis atas kemampuan skema perlinsos sepanjang hayat dalam membangun ketahanan Penerima Manfaat 9. Hambatan dan permasalahan 10. Saran dan Rekomendasi perbaikan kebijakan/ implementasi					
A.3.d	Peningkatan Akuntabilitas Subsidi Program Kesejahteraan Sosial	1. Analisis kebijakan pelaksanaan subsidi tepat sasaran berbasis penerima manfaat 2. Analisis atas akuntabilitas penyaluran subsidi program kesejahteraan sosial kepada penerima manfaat (ketepatan sasaran, waktu, jumlah, volume dan administrasi) 3. Analisis atas mekanisme dan pengendalian pelaksanaan	D2		V		V

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
1		2	3	I	II	III	IV
				4	5	6	7
		penyaluran subsidi 4. Analisis efektivitas implementasi skema subsidi berbasis penerima manfaat. 5. Hambatan dan permasalahan 6. Saran dan Rekomendasi perbaikan kebijakan/ implementasi					
A.4	Pembangunan SDM di Daerah	Triwulan III: 1. Potret sebaran dan disparitas pembangunan manusia di daerah 2. Potret intervensi pemerintah daerah (potret anggaran, keselarasan dan kecukupan intervensi, serta fokus intervensi) terkait pembangunan SDM di daerah, meliputi: peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan; peningkatan dan kualitas dan aksesibilitas kesehatan; serta peningkatan kesejahteraan sosial 3. Simpulan efektivitas intervensi penda terkait pembangunan SDM di daerah.	D3			V	
A.4.a	Isu kewilayahan pendidikan	Triwulan III: 1. Analisis kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan di daerah (ketepatan dan kecukupan), termasuk kebijakan peningkatan akses dan kualitas pendidikan 2. Potret penyelenggaraan pendidikan di daerah, meliputi analisis desain intervensi penyelenggaraan pendidikan (sebaran anggaran, konvergensi dan fokus intervensi) 3. Akuntabilitas peningkatan kualitas pendidikan <ul style="list-style-type: none"> - Analisis kebijakan dan efektivitas pelaksanaan peran pemerintah daerah terkait implementasi kurikulum di daerah - Analisis kebijakan dan efektivitas upaya peningkatan 	D3			V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
1		2	3	I 4	II 5	III 6	IV 7
		<p>kualitas guru dan pola distribusi guru</p> <p>4. Akuntabilitas peningkatan aksesibilitas pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analisis tren dan kesenjangan pemenuhan sarpras dengan kebutuhannya - Analisis pemenuhan kebutuhan sarpras berdasarkan sumber dana (DAK dan non-DAK) <p>5. Analisis efektivitas intervensi pemda dalam peningkatan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan, termasuk pencapaian SPM Bidang Pendidikan</p> <p>6. Hambatan terkait peningkatan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan di daerah</p> <p>7. Rekomendasi perbaikan</p>					
A.4.b	Isu kewilayahan kesehatan	<p>Triwulan III:</p> <p>1. Analisis kebijakan terkait penyelenggaraan kesehatan di daerah (ketepatan dan kecukupan), termasuk kebijakan peningkatan akses dan kualitas kesehatan</p> <p>2. Potret penyelenggaraan kesehatan di daerah, meliputi analisis desain intervensi penyelenggaraan pendidikan (sebaran anggaran, konvergensi dan fokus intervensi)</p> <p>3. Akuntabilitas peningkatan kualitas kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analisis kebijakan dan efektivitas pelaksanaan peran pemerintah daerah terkait implementasi akreditasi Layanan kesehatan (FKTP dan FKTL) di daerah - Analisis kebijakan dan efektivitas upaya peningkatan kualitas dan pola distribusi tenaga kesehatan. <p>4. Akuntabilitas peningkatan aksesibilitas kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analisis tren dan kesenjangan pemenuhan sarpras dengan kebutuhannya - Analisis pemenuhan kebutuhan sarpras berdasarkan 	D3			V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		<p>sumber dana (DAK dan non-DAK)</p> <p>5. Analisis efektivitas intervensi pemda dalam peningkatan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan kesehatan, termasuk pencapaian SPM Bidang Kesehatan</p> <p>6. Hambatan terkait peningkatan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan kesehatan di daerah</p> <p>7. Rekomendasi perbaikan.</p>					
A.4.c	Isu kewilayahan Kesejahteraan Sosial	<p>Triwulan III:</p> <p>1. Analisis ketepatan kebijakan terkait penyelenggaraan program kesejahteraan sosial di daerah di daerah, termasuk Kelompok Masyarakat Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan.</p> <p>2. Potret penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah</p> <p>3. Akuntabilitas dan keberlanjutan intervensi penyelenggaraan kesejahteraan sosial (sebaran anggaran, konvergensi dan fokus intervensi)</p> <p>4. Analisis efektivitas program kesejahteraan sosial meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analisis efektivitas intervensi pemda dalam peningkatan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk pencapaian SPM - Bidang Kesejahteraan Sosial - Analisis efektivitas ketepatan basis data penerima (updating data, integrasi dan pemanfaatan data) - Analisis efektivitas pelaksanaan peran pemerintah daerah terkait penyaluran bantuan sosial pemda maupun desa <p>6. Hambatan terkait peningkatan kesejahteraan sosial di</p>	D3			V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		daerah 7. Rekomendasi perbaikan					
B	Percepatan Penyelesaian Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	1. Analisis kebijakan dan alokasi anggaran pemerintah pusat dalam penguatan infrastruktur dan konektivitas; 2. Potret penyelesaian pembangunan infrastruktur dan konektivitas; 3. Akuntabilitas keuangan dan kinerja; 4. Analisis dampak pembangunan infrastruktur dan konektivitas; 5. Permasalahan/hambatan penyelesaian pembangunan infrastruktur dan konektivitas; 6. Gambaran inefisiensi; 7. Modus kecurangan dan rekomendasi mitigasinya; 8. Rekomendasi penguatan alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur dan konektivitas	D1		V		
B.1	Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar (PSN dan Non PSN)	1. Gambaran pembangunan infrastruktur pelayanan dasar di Indonesia 2. Simpulan keselarasan antara rancangan dan implementasi pembangunan infrastruktur pelayanan dasar 3. Simpulan tata kelola dan manajemen risiko program 4. Simpulan efektivitas dan efisiensi program pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dalam mendorong pemenuhan kebutuhan dasar	D1		V		
B.1.a	Pembangunan Perumahan Rakyat (Perumahan Khusus dan Rumah Susun, Bantuan Stimulan	Triwulan II: 1. Potret atas kondisi, kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur perumahan rakyat secara nasional dan regional 2. Potret ketepatan dan keselarasan antara perencanaan	D1		V		

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
	Perumahan Rakyat)	<p>dan implementasi program Pembangunan Perumahan Rakyat (potret di Pusat dan Daerah), termasuk progres dan langkah percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur</p> <p>3. Akuntabilitas keuangan dan kinerja, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Operasionalisasi infrastruktur yang telah dibangun - Analisis ketepatan sasaran, jumlah, waktu, kualitas dan administrasi <p>4. Analisis pemanfaatan, <i>outcome</i> dan dampak atas pembangunan infrastruktur</p> <p>5. Tindak lanjut dan perbaikan atas hasil pengawasan dan pemeriksaan sebelumnya</p> <p>6. Analisis hambatan/kendala utama penyebab ketidaklancaran pembangunan infrastruktur, termasuk kelemahan tata kelola program</p> <p>7. Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan, termasuk percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur</p>					
B.1.b	Pembangunan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM)	<p>Triwulan II:</p> <p>1. Potret kondisi, kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur air bersih secara nasional dan regional</p> <p>2. Potret ketepatan dan keselarasan antara perencanaan dan implementasi program SPAM (potret di Pusat dan Daerah), termasuk progres dan langkah percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur</p> <p>3. Akuntabilitas keuangan dan kinerja, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Operasionalisasi infrastruktur yang telah dibangun - Analisis ketepatan sasaran, jumlah, waktu, kualitas dan administrasi <p>4. Analisis pemanfaatan, <i>outcome</i> dan dampak atas</p>	D1		V		

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		pembangunan infrastruktur SPAM 5. Tindak lanjut dan perbaikan atas hasil pengawasan dan pemeriksaan sebelumnya 6. Analisis hambatan/kendala utama penyebab ketidaklancaran pembangunan infrastruktur, termasuk kelemahan tata kelola program SPAM 7. Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan, termasuk percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur SPAM					
B.1.c	Pembangunan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) dan Sanitasi	Triwulan II: 1. Potret atas kondisi, kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur pengolahan air limbah dan sanitasi secara nasional dan regional 2. Potret ketepatan dan keselarasan antara perencanaan dan implementasi program SPAL dan sanitasi (potret di Pusat dan Daerah), termasuk progres dan langkah percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur 3. Akuntabilitas keuangan dan kinerja, meliputi: - Operasionalisasi infrastruktur yang telah dibangun - Analisis ketepatan sasaran, jumlah, waktu, kualitas dan administrasi 4. Analisis pemanfaatan, <i>outcome</i> dan dampak atas pembangunan infrastruktur SPAL dan sanitasi 5. Tindak lanjut dan perbaikan atas hasil pengawasan sebelumnya 6. Analisis hambatan/kendala utama penyebab ketidaklancaran pembangunan infrastruktur, termasuk kelemahan tata kelola program SPAL dan sanitasi 7. Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan, termasuk	D1		V		

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur SPAL dan Sanitasi					
B.2	Penguatan Infrastruktur Konektivitas dan Mobilitas (PSN & Non PSN)	Triwulan II: 1. Gambaran kondisi pembangunan infrastruktur konektivitas dan mobilitas secara nasional 2. Simpulan atas tata kelola infrastruktur konektivitas dan mobilitas 3. Simpulan atas efektivitas pembangunan infrastruktur konektivitas dan mobilitas dalam mengurangi biaya logistik, serta peningkatan arus barang dan orang 4. Gambaran atas keberlanjutan (<i>going concern</i>) dan efisiensi terkait utilitas infrastruktur konektivitas dan mobilitas	D1		V		
B.2.a	Pembangunan Jalan dan Jembatan (termasuk Jalan Trans Papua)	Triwulan II: 1. Potret kondisi infrastruktur jalan dan jembatan secara regional dan nasional, termasuk analisis kebutuhan pembangunan jalan dan jembatan baru 2. Potret ketepatan dan keselarasan antara perencanaan dan implementasi program jalan dan jembatan (potret di Pusat dan Daerah), termasuk progres dan langkah percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur 3. Akuntabilitas keuangan dan kinerja, meliputi: - Operasionalisasi infrastruktur yang telah dibangun - Analisis ketepatan sasaran, jumlah, waktu, kualitas dan administrasi 4. Kesenambungan dan keselarasan pembangunan jalan dan jembatan (jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota) termasuk integrasi dalam mendukung konektivitas lainnya seperti bandara, dan	D1		V		

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		<p>pelabuhan</p> <p>5. Analisis pemanfaatan, <i>outcome</i> dan dampak atas pembangunan infrastruktur secara nasional serta pada daerah 3TP (tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan) dalam mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru</p> <p>6. Efektivitas kegiatan pemeliharaan infrastruktur</p> <p>7. Tindak lanjut dan perbaikan atas hasil pengawasan dan pemeriksaan sebelumnya</p> <p>8. Analisis risiko <i>fraud</i> program pembangunan infrastruktur</p> <p>9. Analisis hambatan/kendala utama penyebab ketidاكلancaran pembangunan infrastruktur, termasuk kelemahan tata kelola program</p> <p>10. Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan, termasuk percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur</p>					
B.2.b	Pembangunan Jalan Tol	<p>Triwulan II:</p> <p>1. Potret kondisi infrastruktur jalan dan jembatan secara regional dan nasional, termasuk analisis kebutuhan pembangunan jalan tol</p> <p>2. Potret ketepatan dan keselarasan antara perencanaan dan implementasi program jalan tol (potret di Pusat dan Daerah), termasuk progres dan langkah percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur</p> <p>3. Akuntabilitas keuangan dan kinerja, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Operasionalisasi infrastruktur yang telah dibangun - Analisis ketepatan sasaran, jumlah, waktu, kualitas dan administrasi <p>4. Analisis pemanfaatan, <i>outcome</i> dan dampak atas</p>	D1		V		

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		<p>pembangunan infrastruktur secara nasional dalam mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru</p> <p>5. Kelayakan, tata kelola, efisiensi dan keberlanjutan (<i>going concern</i>) perusahaan jalan tol (termasuk kewajaran harga/tarif)</p> <p>6. Efektivitas kegiatan pemeliharaan infrastruktur</p> <p>7. Tindak lanjut dan perbaikan atas hasil pengawasan dan pemeriksaan sebelumnya</p> <p>8. Analisis risiko <i>fraud</i> program pembangunan infrastruktur</p> <p>9. Analisis hambatan/kendala utama penyebab ketidaklancaran pembangunan infrastruktur, termasuk kelemahan tata kelola program</p> <p>10. Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan, termasuk percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur</p>					
B.2.c	Pembangunan Pelabuhan (termasuk Pelabuhan Utama)	<p>Triwulan II:</p> <p>1. Potret kondisi infrastruktur jalan dan jembatan secara regional dan nasional, termasuk analisis kebutuhan pembangunan pelabuhan</p> <p>2. Potret ketepatan dan keselarasan antara perencanaan dan implementasi program pembangunan pelabuhan (potret di Pusat dan Daerah), termasuk progres dan langkah percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur</p> <p>3. Akuntabilitas keuangan dan kinerja, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Operasionalisasi infrastruktur yang telah dibangun - Analisis ketepatan sasaran, jumlah, waktu, kualitas dan administrasi 	D1		V		

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
1	2	3	I	II	III	IV	
			4	5	6	7	
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Analisis pemanfaatan, <i>outcome</i> dan dampak atas pembangunan infrastruktur secara nasional dalam mendukung transformasi ekonomi dan tol laut 5. Potret konektivitas infrastruktur pendukung (aksesibilitas jalan, jalan tol, sentra ekonomi) 6. Kelayakan, tata kelola, efisiensi dan keberlanjutan (<i>going concern</i>) perusahaan pelabuhan (termasuk kewajaran harga/tarif) 7. Tindak lanjut dan perbaikan atas hasil pengawasan dan pemeriksaan sebelumnya 8. Analisis risiko kecurangan (<i>fraud</i>) program pembangunan infrastruktur 9. Analisis hambatan/kendala utama penyebab ketidaklancaran pembangunan infrastruktur, termasuk kelemahan tata kelola program 10. Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan, termasuk percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur 					
B.2.d	Pembangunan Kereta (termasuk Kereta Api Makassar - Pare Pare)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potret kondisi infrastruktur jalan dan jembatan secara regional dan nasional, termasuk analisis kebutuhan pembangunan kereta 2. Potret ketepatan dan keselarasan antara perencanaan dan implementasi program pembangunan kereta (potret di Pusat dan Daerah), termasuk progres dan langkah percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur 3. Akuntabilitas keuangan dan kinerja, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Operasionalisasi infrastruktur yang telah dibangun - Analisis ketepatan sasaran, jumlah, waktu, kualitas dan administrasi 	D1		V		

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
1	2	3	I	II	III	IV	
			4	5	6	7	
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Analisis pemanfaatan, <i>outcome</i> dan dampak atas pembangunan infrastruktur secara nasional dalam mendukung transformasi ekonomi 5. Potret konektivitas infrastruktur pendukung (jalur kereta terintegrasi antar daerah, aksesibilitas jalan, jalan tol, sentra ekonomi) 6. Kelayakan, tata kelola, efisiensi dan keberlanjutan (<i>going concern</i>) perusahaan kereta (termasuk kewajaran harga/tarif) 7. Tindak lanjut dan perbaikan atas hasil pengawasan dan pemeriksaan sebelumnya 8. Analisis risiko <i>fraud</i> program pembangunan infrastruktur 9. Analisis hambatan/kendala utama penyebab ketidklancaran pembangunan infrastruktur, termasuk kelemahan tata kelola program 10. Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan, termasuk percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur 					
B.2.e	Pembangunan Bandara (termasuk Jembatan Udara 37 rute di Papua)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potret kondisi infrastruktur jalan dan jembatan secara regional dan nasional, termasuk analisis kebutuhan pembangunan bandara 2. Potret ketepatan dan keselarasan antara perencanaan dan implementasi program pembangunan kereta (potret di Pusat dan Daerah), termasuk progres dan langkah percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur 3. Akuntabilitas keuangan dan kinerja, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Operasionalisasi infrastruktur yang telah dibangun - Analisis ketepatan sasaran, jumlah, waktu, kualitas dan administrasi 	D1		V		

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		<p>4. Analisis pemanfaatan, <i>outcome</i> dan dampak atas pembangunan infrastruktur secara nasional dalam mendukung transformasi ekonomi, termasuk peran Jembatan Udara terhadap layanan transportasi/logistik wilayah 3TP</p> <p>5. Potret konektivitas infrastruktur pendukung (aksesibilitas jalan, jalan tol, kereta)</p> <p>6. Kelayakan, tata kelola, efisiensi dan keberlanjutan (<i>going concern</i>) pengusahaan bandara (termasuk kewajaran harga/tarif)</p> <p>7. Tindak lanjut dan perbaikan atas hasil pengawasan dan pemeriksaan sebelumnya</p> <p>8. Analisis risiko <i>fraud</i> program pembangunan infrastruktur</p> <p>9. Analisis hambatan/kendala utama penyebab ketidaklancaran pembangunan infrastruktur, termasuk kelemahan tata kelola program</p> <p>10. Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan, termasuk percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur</p>					
B.3	Pembangunan Infrastruktur Transportasi Massal Perkotaan	<p>1. Potret kondisi pembangunan infrastruktur transportasi massal perkotaan, termasuk analisis kebutuhan pembangunan infrastruktur di 6 kota besar (Jakarta, Medan, Semarang, Bandung, Surabaya, Makassar)</p> <p>2. Potret ketepatan dan keselarasan antara perencanaan dan implementasi program pembangunan infrastruktur transportasi massal perkotaan (potret di Pusat dan Daerah), termasuk progres dan langkah percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur</p> <p>3. Akuntabilitas keuangan dan kinerja, meliputi:</p>	D1				V

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> - Operasionalisasi infrastruktur yang telah dibangun - Analisis ketepatan sasaran, jumlah, waktu, kualitas dan administrasi <p>4. Analisis pemanfaatan, <i>outcome</i> dan dampak infrastruktur transportasi massal perkotaan</p> <p>5. Kelayakan, tata kelola, efisiensi dan keberlanjutan (<i>going concern</i>) perusahaan transportasi massal (termasuk kewajaran harga/tarif)</p> <p>6. Analisis risiko <i>fraud</i> program pembangunan infrastruktur</p> <p>7. Analisis hambatan/kendala utama penyebab ketidaklancaran pembangunan infrastruktur, termasuk kelemahan tata kelola program</p> <p>8. Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan, termasuk percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur</p>					
B.3.a	Pembangunan Infrastruktur Transportasi Massal Perkotaan	<p>1. Potret kondisi pembangunan infrastruktur transportasi massal perkotaan, termasuk analisis kebutuhan pembangunan infrastruktur di 6 kota besar (Jakarta, Medan, Semarang, Bandung, Surabaya, Makassar)</p> <p>2. Potret ketepatan dan keselarasan antara perencanaan dan implementasi program pembangunan infrastruktur transportasi massal perkotaan (potret di Pusat dan Daerah), termasuk progres dan langkah percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur</p> <p>3. Akuntabilitas keuangan dan kinerja, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Operasionalisasi infrastruktur yang telah dibangun - Analisis ketepatan sasaran, jumlah, waktu, kualitas dan administrasi <p>4. Analisis pemanfaatan, <i>outcome</i> dan dampak</p>	D1				V

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		infrastruktur transportasi massal perkotaan 5. Kelayakan, tata kelola, efisiensi dan keberlanjutan (<i>going concern</i>) perusahaan transportasi massal (termasuk kewajaran harga/tarif) 6. Analisis risiko <i>fraud</i> program pembangunan infrastruktur 7. Analisis hambatan/kendala utama penyebab ketidaklancaran pembangunan infrastruktur, termasuk kelemahan tata kelola program 8. Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan, termasuk percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur					
B.4	Infrastruktur yang mendukung Transformasi Digital (PSN dan Non PSN)	1. Potret keselarasan antara kebijakan penyelenggaraan SPBE, PDN dan SDI; 2. Potret aksesibilitas internet dan komunikasi antar wilayah; 3. Simpulan atas tata kelola dan kelembagaan infrastruktur pendukung transformasi digital; 4. Simpulan atas efektivitas pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya pada daerah 3T; 5. Gambaran atas keberlanjutan (<i>going concern</i>); dan efisiensi terkait utilitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.	D2			V	
B.4.a	Pemerataan dan Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Gambaran sebaran akses internet dan komunikasi antar wilayah (termasuk disparitas/ketimpangan), termasuk analisis kebutuhan penyediaan infrastruktur TIK; 2. Analisis atas kecukupan dan keselarasan kebijakan dan rancangan/peta jalan pemerataan akses internet dan	D2		V		

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		komunikasi; 3. Ketepatan dan keselarasan perencanaan dan implementasi pemerataan infrastruktur akses TIK; 4. Akuntabilitas keuangan dan kinerja, termasuk: - Progres capaian pemerataan dan penyediaan infrastruktur, akses internet dan komunikasi, serta langkah percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur - Analisis ketepatan jumlah, waktu, kualitas, dan administrasi 5. Analisis pemanfaatan, <i>outcome</i> dan dampak atas pembangunan infrastruktur secara nasional dalam mendukung transformasi ekonomi, termasuk di wilayah 3TP; 6. Analisis hambatan/kendala utama penyebab ketidaklancaran pembangunan infrastruktur, termasuk kelemahan tata kelola program; dan 7. Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan, termasuk percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur					
B.4.b	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan integrasi dengan Satu Data Indonesia (SDI) dan Pusat Data Nasional (PDN)	1. Analisis kecukupan dan keselarasan kebijakan SPBE, SDI dan PDN dalam meningkatkan kualitas layanan publik; 2. Potret pelaksanaan SPBE, SDI, dan PDN meliputi aspek efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, interoperabilitas, keamanan, dan efisiensi dengan prioritas pada sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, administrasi kependudukan, transaksi keuangan negara, dan layanan kepolisian); 3. Analisis dampak penerapan SPBE, pemanfaatan SDI,	D2			V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		<p>dan pembangunan PDN terhadap peningkatan kualitas layanan pemerintah;</p> <p>4. Analisis hambatan/kendala utama penyebab ketidaklancaran implementasi SPBE, SDI, dan penyediaan PDN; dan</p> <p>5. Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan, percepatan implementasi SPBE dan SDI, dan penyediaan PDN.</p>					
B.5	Pembangunan dan Tata Kelola Ibu Kota	<p>Triwulan 1:</p> <p>1. Kecukupan dan keselarasan kebijakan serta grand design pembangunan IKN</p> <p>2. Analisis ketepatan dan keselarasan perencanaan dan implementasi pembangunan IKN (untuk setiap K/L/P terkait)</p> <p>3. Sustainability pembiayaan pembangunan IKN</p> <p>4. Progres penyiapan kelembagaan OIKN sebagai administrator IKN 2024</p> <p>5. Analisis kesiapan infrastruktur dan pemindahan ASN pada tahun 2024.</p> <p>6. Progres pembangunan IKN</p> <p>7. Analisis hambatan/kendala utama penyebab ketidaklancaran pembangunan infrastruktur, termasuk kelemahan tata kelola Otorita IKN</p> <p>8. Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan, termasuk percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur</p> <p>Triwulan II dan III:</p> <p>1. Akuntabilitas pembangunan IKN dan progres kesiapan operasionalisasi ibu kota baru</p>	D1	V	V	V	V

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		<p>2. Analisis kesiapan infrastruktur dan pemindahan ASN pada tahun 2024.</p> <p>Triwulan IV:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis ketepatan dan keselarasan perencanaan dan implementasi pembangunan IKN (untuk setiap K/L/P terkait) 2. Sustainability pembiayaan pembangunan IKN 3. Akuntabilitas keuangan dan kinerja, termasuk progres pembangunan IKN dan progres kesiapan operasionalisasi ibukota baru 4. Analisis hambatan/kendala utama penyebab ketidaklancaran pembangunan infrastruktur. 5. Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan, termasuk percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur 					
B.5.a	Pembangunan dan Tata Kelola Ibu Kota Nusantara (IKN)	<p>Triwulan 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecukupan dan keselarasan kebijakan serta <i>grand design</i> pembangunan IKN 2. Analisis ketepatan dan keselarasan perencanaan dan implementasi pembangunan IKN (untuk setiap K/L/D terkait) 3. Sustainability pembiayaan pembangunan IKN 4. Progres penyiapan kelembagaan OIKN sebagai administrator IKN 2024 5. Analisis kesiapan infrastruktur dan pemindahan ASN pada tahun 2024. 6. Progres pembangunan IKN 7. Analisis hambatan/kendala utama penyebab 	DI	V	V	V	V

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		<p>ketidaklancaran pembangunan infrastruktur, termasuk kelemahan tata kelola Otorita IKN</p> <p>8. Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan, termasuk percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur</p> <p>Triwulan II dan III:</p> <p>1. Akuntabilitas pembangunan IKN dan progres kesiapan operasionalisasi ibukota baru</p> <p>2. Analisis kesiapan insfrastruktur dan pemindahan ASN pada tahun 2024.</p> <p>Triwulan IV:</p> <p>1. Analisis ketepatan dan keselarasan perencanaan dan implementasi pembangunan IKN (untuk setiap K/L/D terkait)</p> <p>2. <i>Sustainability</i> pembiayaan pembangunan IKN</p> <p>3. Akuntabilitas keuangan dan kinerja, termasuk progres pembangunan IKN dan progres kesiapan operasionalisasi ibukota baru</p> <p>4. Analisis hambatan/kendala utama penyebab ketidaklancaran pembangunan infrastruktur.</p> <p>5. Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan, termasuk percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur</p>					
C	Akuntabilitas Keuangan Pusat, Daerah, Desa, dan Kekayaan Negara/Daerah/Desa yang Dipisahkan	<p>1. Potret postur APBN/Daerah/Desa TA 2024;</p> <p>2. Analisis alokasi prioritas dan efektivitas belanja pemerintah (pusat, daerah, desa) TA 2024;</p> <p>3. Permasalahan/hambatan utama dalam percepatan belanja dan pengadaan barang/jasa pemerintah (pusat/daerah/desa);</p>	D1		V		V

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> 4. Permasalahan/risiko utama yang menyebabkan ketidakefisienan belanja; 5. Permasalahan/risiko utama yang menyebabkan tidak optimalnya pendapatan; 6. Permasalahan/risiko utama yang menyebabkan tidak optimalnya pengelolaan pembiayaan (pusat dan daerah); 7. Potret kualitas tata kelola dan kinerja BUMN/BUMD/BLU/BLUD; 8. Permasalahan/risiko utama yang menyebabkan tidak optimalnya kinerja BUMN/BUMD/BLU/BLUD; 9. Rekomendasi perbaikan kebijakan akuntabilitas keuangan negara/daerah/desa dan BUMN/BUMD/BLU/BLUD 					
C.1	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Analisis postur dan realisasi APBN 2024 2. Analisis kualitas belanja pemerintah (kualitas perencanaan dan penganggaran, disiplin eksekusi belanja, dan efektivitas belanja pemerintah) 3. Analisis kualitas tata kelola dan kinerja pendapatan negara 4. Analisis akuntabilitas dan efektivitas pembiayaan 5. Simpulan kesinambungan fiskal pemerintah 6. Analisis kualitas desain dan efektivitas pengelolaan risiko fiskal 7. Rekomendasi perbaikan kebijakan 	D1		V		V
C.1.a	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Sektoral	<ul style="list-style-type: none"> 1. Potret perencanaan dan penganggaran sektoral (tata kelola intervensi, K/L yang terlibat, sebaran anggaran, dan fokus intervensi) 2. Kualitas desain intervensi pemerintah (perencanaan prioritas nasional dan kementerian lembaga) 	D1	V			

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		3. Kualitas bauran perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah 4. Analisis potensi efektivitas dan efisiensi dari sisi perencanaan dan penganggaran 5. Analisis potensi ketercapaian tujuan 6. Permasalahan terkait perencanaan dan penganggaran 7. Rekomendasi perbaikan					
C.1.b	Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pusat	Triwulan I: 1. Postur belanja negara (analisis tren berdasarkan jenis belanja, prioritas sektoral, dan alokasi belanja KL) 2. Rencana penarikan dana dan proyeksi serapan belanja 3. Potret rencana PBJ K/L 4. Realisasi belanja dan PBJ 5. Realisasi pendapatan negara 6. Hambatan terkait realisasi belanja dan PBJ 7. Rekomendasi perbaikan Triwulan II dan III: 1. Analisis realisasi belanja dan PBJ 2. Analisis disiplin belanja (realisasi dibandingkan RPD awal) 3. Analisis keandalan rencana belanja (Potret penyesuaian RPD triwulan berjalan dengan RPD awal) 4. Analisis pengelolaan risiko fiskal terkait perubahan ekonomi makro terhadap belanja 5. Realisasi pendapatan negara 6. Spending review sektoral, meliputi: - analisis kebijakan pembangunan sektor (ketepatan, kecukupan, keselarasan)	D1	V	V	V	V

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> - potret desain bauran intervensi - analisis efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan pembangunan sektor 7. Hambatan terkait realisasi belanja dan PBJ 8. Rekomendasi perbaikan Triwulan IV: 1. Analisis realisasi belanja dan PBJ 2. Analisis disiplin belanja (realisasi dibandingkan RPD awal) 3. Analisis keandalan rencana belanja (Potret penyesuaian RPD triwulan berjalan dengan RPD awal) 4. Analisis pengelolaan risiko fiskal terkait perubahan ekonomi makro terhadap belanja 5. Kontribusi belanja terhadap perekonomian nasional 6. Realisasi pendapatan negara 7. Hambatan terkait realisasi belanja dan PBJ 8. Rekomendasi perbaikan					
C.1.c	Optimalisasi Pendapatan Negara (Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai, serta PNBPN)	1. Analisis ketepatan, keselarasan, dan kecukupan kebijakan terkait pendapatan negara 2. Analisis kualitas penetapan target pendapatan negara 3. Analisis tren dan realisasi pendapatan negara 4. Analisis tata kelola basis data objek pendapatan negara (integrasi dengan basis data lain, kemutakhiran data, dan efektivitas pemanfaatan basis data dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran) 5. Analisis efektivitas strategi optimalisasi pendapatan negara 6. Analisis pengelolaan risiko fiskal terkait pendapatan	D1				V

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
1		2	3	I 4	II 5	III 6	IV 7
		<p>negara</p> <p>7. Hambatan dalam pengumpulan pendapatan negara</p> <p>8. Rekomendasi perbaikan</p>					
C.1.d	Tata Kelola <i>Tax Expenditure</i>	<p>1. Analisis desain kebijakan <i>tax expenditure</i> (ketepatan, keselarasan, dan kecukupan), tidak terbatas pada insentif perpajakan</p> <p>2. Potret tata kelola <i>tax expenditure</i> dan perbandingannya dengan negara lain (<i>benchmarking</i>)</p> <p>3. Potret <i>tax expenditure</i> (tren dan posisi terkini, berdasarkan jenis pajak, sektor perekonomian, dan fungsi pemerintah)</p> <p>4. Akuntabilitas penetapan perlakuan khusus/fasilitas/insentif perpajakan (<i>tax expenditure</i>), termasuk alasan penetapan</p> <p>5. Akuntabilitas estimasi dan proyeksi <i>tax expenditure</i></p> <p>6. Analisis efektivitas penerapan kebijakan <i>tax expenditure</i>, termasuk implikasinya terhadap rasio perpajakan</p> <p>7. Analisis pengelolaan risiko terkait penerapan kebijakan <i>tax expenditure</i></p> <p>8. Hambatan terkait penerapan kebijakan <i>tax expenditure</i></p> <p>9. Rekomendasi perbaikan</p>	D1				V
C.1.e	Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan	<p>1. Analisis kebijakan pembiayaan pemerintah, mencakup pengelolaan utang dan pengembangan pembiayaan inovatif</p> <p>2. Potret pembiayaan pemerintah</p> <p>3. Analisis efektivitas pengelolaan risiko pembiayaan pemerintah</p> <p>4. Analisis <i>sustainability</i> pembiayaan inovatif melalui skema KPBU dan penugasan pada SMV</p>	D1				V

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		5. Hambatan dalam pengelolaan dan optimalisasi pembiayaan pemerintah 6. Rekomendasi perbaikan.					
C.2	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Analisis postur dan realisasi APBD 2024 2. Analisis kemandirian fiskal daerah 3. Analisis kualitas belanja pemerintah daerah (kualitas perencanaan dan penganggaran, disiplin eksekusi belanja, dan efektivitas belanja pemerintah) 4. Analisis kualitas tata kelola dan kinerja pendapatan daerah 5. Analisis akuntabilitas dan efektivitas pembiayaan daerah 6. Analisis akuntabilitas dan efektivitas dana transfer (DAU, DAK, DBH, dan Dana Otsus) 7. Simpulan kesinambungan fiskal pemerintah daerah 8. Analisis kualitas desain dan efektivitas pengelolaan risiko fiskal daerah 9. Rekomendasi perbaikan kebijakan	D3		V		V
C.2.a	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Sektoral	1. Potret perencanaan dan penganggaran sektoral (tata kelola intervensi, perangkat daerah yang terlibat, sebaran anggaran, dan fokus intervensi) 2. Kualitas desain intervensi pemerintah daerah (<i>logic model intervensi</i>) 3. Analisis potensi efektivitas dan efisiensi dari sisi perencanaan dan penganggaran 4. Analisis potensi ketercapaian tujuan pembangunan daerah 5. Permasalahan terkait perencanaan dan penganggaran daerah	D3	V			

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		6. Rekomendasi perbaikan					
C.2.b	Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	<p>Triwulan I:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Postur belanja daerah (analisis tren berdasarkan jenis dan prioritas belanja daerah) 2. Postur pendapatan daerah (analisis tren berdasarkan jenis dan analisis kemandirian fiskal daerah) 3. Rencana penarikan dana dan proyeksi serapan belanja daerah 4. Potret rencana PBJ (agregat dan analisis berdasarkan urusan dan jenis PBJ) 5. Realisasi belanja dan PBJ daerah 6. Realisasi pendapatan daerah 7. Hambatan terkait realisasi belanja, PBJ, dan pendapatan daerah 8. Rekomendasi perbaikan <p>Triwulan II dan III:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis realisasi belanja dan PBJ daerah 2. Analisis disiplin belanja daerah (realisasi dibandingkan <i>cash disbursement plan</i> awal dan <i>cash disbursement plan</i> terkini) 3. Analisis keandalan rencana belanja (potret penyesuaian <i>cash disbursement plan</i> triwulan berjalan dengan <i>cash disbursement plan</i> awal) 4. Realisasi pendapatan daerah 5. Spending review sektoral, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - analisis kebijakan pembangunan sektor (ketepatan, kecukupan, keselarasan) - potret desain bauran intervensi 	D3	V	V	V	V

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> - analisis efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan pembangunan sektor 6. Hambatan terkait realisasi belanja, PBJ, dan pendapatan daerah 7. Rekomendasi perbaikan <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Analisis realisasi belanja dan PBJ daerah 2. Analisis disiplin belanja (realisasi dibandingkan <i>disbursement plan</i> awal) 3. Analisis keandalan rencana belanja (potret penyesuaian <i>disbursement plan</i> triwulan berjalan dengan <i>disbursement plan</i> awal) 4. Realisasi pendapatan daerah 5. Analisis efektivitas belanja daerah 6. Hambatan terkait realisasi belanja, PBJ, dan pendapatan daerah 7. Rekomendasi perbaikan 					
C.2.c	Akuntabilitas Dana Alokasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Analisis kebijakan terkait DAU (ketepatan, keselarasan, dan kecukupan; termasuk kebijakan terkait penggunaan DAU) 2. Potret DAU (analisis berdasarkan tren dan posisi terkini, analisis potret prioritas berdasarkan bidang dan daerah, serta analisis ketepatan pengalokasian DAU) 3. Analisis akuntabilitas dan efektivitas penggunaan DAU, termasuk implementasi DAU yang ditentukan penggunaannya 4. Hambatan terkait penetapan, penyaluran, dan penggunaan DAU 	D3				V

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		5. Rekomendasi perbaikan					
C.2.d	Akuntabilitas Dana Bagi Hasil	1. Analisis kebijakan terkait DBH (ketepatan, keselarasan, dan kecukupan) 2. Potret DBH (analisis berdasarkan tren dan posisi terkini, dan sebaran) 3. Akuntabilitas pengalokasian dan penyaluran DBH, meliputi: - Analisis atas basis penghitungan alokasi - Ketepatan penghitungan alokasi - Ketepatan dan kecepatan penyaluran 4. Dampak penyaluran DBH dalam mengurangi kesenjangan vertikal 5. Hambatan terkait penetapan dan penyaluran DBH 6. Rekomendasi perbaikan	D3				V
C.2.e	Akuntabilitas Dana Alokasi Khusus	1. Analisis kebijakan terkait dana alokasi khusus (ketepatan, keselarasan, dan kecukupan) 2. Potret DAK (analisis berdasarkan tren dan posisi terkini, analisis potret prioritas berdasarkan bidang dan daerah, serta analisis ketepatan pengalokasian DAK) 3. Analisis akuntabilitas dan efektivitas penggunaan DAK 4. Hambatan terkait penetapan, penyaluran, dan penggunaan DAK 5. Rekomendasi perbaikan	D3				V
C.2.f	Akuntabilitas Dana Otonomi Khusus	1. Analisis kebijakan terkait Dana Otsus (ketepatan, keselarasan, dan kecukupan), termasuk kecukupan kebijakan percepatan pembangunan daerah otonomi khusus 2. Potret Dana Otsus (analisis berdasarkan tren dan posisi terkini, analisis potret prioritas berdasarkan bidang dan	D3		V		

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		daerah, serta analisis ketepatan pengalokasian Dana Otsus) 3. Analisis akuntabilitas dan efektivitas penggunaan Dana Otsus 4. Analisis atas current issue pada daerah otonomi khusus, termasuk implikasinya terhadap penetapan, penyaluran, dan penggunaan Dana Otsus 5. Hambatan terkait penetapan, penyaluran, dan penggunaan Dana Otsus 6. Rekomendasi perbaikan					
C.2.g	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	1. Analisis ketepatan, keselarasan, dan kecukupan kebijakan dan tata kelola terkait pendapatan asli daerah 2. Analisis dampak/implikasi penerapan UU HKPD dan turunannya, serta potret kesiapan/progres penerapan di daerah 3. Analisis kualitas penetapan target pendapatan asli daerah 4. Analisis tren dan realisasi pendapatan asli daerah 5. Analisis tata kelola basis data objek pendapatan asli daerah (integrasi dengan basis data lain, kemutakhiran data, dan efektivitas pemanfaatan basis data dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran) 6. Analisis efektivitas strategi optimalisasi pendapatan asli daerah (termasuk praktik baik pelaksanaan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah) 7. Hambatan dalam pengumpulan pendapatan negara 8. Rekomendasi perbaikan	D3				V
C.2.h	Peningkatan Kualitas Pembiayaan Daerah	1. Potret kebijakan dan tata kelola pembiayaan daerah (analisis ketepatan, keselarasan, dan kecukupan	D3		V		V

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		kebijakan) 2. Potret pembiayaan daerah dan komposisi utang pemerintah daerah (analisis potret, kebutuhan, dan realisasi pemenuhan pembiayaan) 3. Capaian realisasi pembiayaan daerah dibandingkan target 4. Identifikasi hambatan dalam pembiayaan daerah, termasuk hambatan regulasi 5. Efektivitas pemanfaatan pembiayaan daerah 6. Rekomendasi atas perbaikan kebijakan/implementasi.					
C.3	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa	1. Analisis desain dan bauran kebijakan terkait tata kelola, keuangan, dan pembangunan desa 2. Analisis postur dan realisasi keuangan desa 2024 3. Analisis kualitas belanja pemerintah desa (kualitas perencanaan dan penganggaran, disiplin eksekusi belanja, dan efektivitas belanja) 4. Analisis kualitas tata kelola dan kinerja BUMDesa 5. Analisis kualitas tata kelola pemerintahan desa 6. Analisis praktik baik dalam pembangunan desa 7. Rekomendasi perbaikan kebijakan (keuangan dan aset)	D3		V		V
C.3.a	Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Desa	Triwulan I: 1. Analisis kebijakan pengelolaan keuangan desa (ketepatan, keselarasan, kecukupan, dan keberlanjutan) 2. Potret intervensi K/L/D terkait pembangunan desa (analisis konvergeni, sebaran, dan fokus intervensi) 3. Postur APBDesa (analisis kebijakan prioritas penggunaan dana desa pada level K/L dan penerapannya oleh pemerintah desa, serta analisis tren pendapatan dan belanja termasuk sebaran belanja per	D3	V	V	V	V

SEKTOR/TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
	<p>bidang dan sektor prioritas desa)</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Analisis alokasi keuangan desa untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan penyelesaian isu terkini 5. Analisis keberlanjutan perencanaan pembangunan desa 6. Hambatan terkait perencanaan dan penganggaran desa 7. Rekomendasi perbaikan <p>Triwulan II:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Potret realisasi belanja dan pendapatan desa (analisis dibandingkan pagu; analisis berdasarkan jenis belanja, bidang; analisis perbandingan berdasarkan tipologi/jenis desa) 2. Potret progres pembangunan desa (analisis dibandingkan target periode terkini dan target tahun berjalan) 3. Analisis peran supradesa dan pendamping desa (tata kelola, kejelasan peran dan tanggung jawab, bottleneck, dan efektivitas) 4. Potret praktik baik terkait keuangan dan pembangunan desa 5. Hambatan terkait pelaksanaan keuangan dan pembangunan desa 6. Rekomendasi perbaikan <p>Triwulan III:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Potret realisasi belanja dan pendapatan desa (analisis dibandingkan pagu; analisis berdasarkan jenis belanja, bidang; analisis perbandingan berdasarkan tipologi/jenis desa) 					

SEKTOR/TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
	<p>2. Potret progres pembangunan desa (analisis dibandingkan target periode terkini dan target tahun berjalan)</p> <p>3. Potret aset desa (analisis tren dan kondisi terkini berdasarkan jenis, sumber/asal perolehan, penggunaan, dan status penguasaan aset)</p> <p>4. Analisis akuntabilitas pemanfaatan aset desa, termasuk analisis kontribusi terhadap pendapatan serta analisis porsi aset desa yang tidak digunakan untuk pelayanan publik</p> <p>5. Peran pembinaan supradesa terkait pemanfaatan aset desa, termasuk pemanfaatan tanah kas desa dan aset produktif</p> <p>6. Hambatan terkait pelaksanaan keuangan, pengelolaan aset, dan pembangunan desa</p> <p>7. Rekomendasi perbaikan</p> <p>Triwulan IV:</p> <p>1. Potret realisasi belanja dan pendapatan desa (analisis dibandingkan pagu; analisis berdasarkan jenis belanja, bidang; analisis perbandingan berdasarkan tipologi/jenis desa)</p> <p>2. Potret progres pembangunan desa (analisis dibandingkan target periode terkini dan target tahun berjalan)</p> <p>3. Analisis peran supradesa dan pendamping desa (tata kelola, kejelasan peran dan tanggung jawab, bottleneck, dan efektivitas)</p> <p>4. Analisis akuntabilitas keuangan dan efektivitas</p>					

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		pembangunan desa 5. Hambatan terkait pelaksanaan keuangan dan pembangunan desa 6. Rekomendasi perbaikan					
C.3.b	Optimalisasi Peran BUMDes	1. Analisis kebijakan terkait pengembangan dan pengelolaan BUMDes (ketepatan, keselarasan, kecukupan) 2. Potret BUMDes (analisis tata kelola; analisis sebaran berdasarkan jenis, sektor/lapangan usaha) 3. Akuntabilitas keuangan dan kinerja BUMDes 4. Analisis kontribusi/kinerja BUMDes terhadap keuangan desa 5. Dampak BUMDes terhadap pembangunan desa (pergerakan ekonomi masyarakat/pemenuhan kebutuhan masyarakat/penyerapan tenaga kerja) 6. Praktik baik pengembangan dan pengelolaan BUMDes 7. Hambatan terkait pengembangan dan pengelolaan BUMDes 8. Rekomendasi perbaikan	D4				V
C.4	Akuntabilitas Pengelolaan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	1. Simpulan atas akuntabilitas dan kualitas tata kelola BUMN/BUMD/BLU/BLUD; 2. Simpulan atas kontribusi BUMN/BUM/BLU/BLUD bagi pembangunan nasional/pemenuhan kebutuhan masyarakat	D4			V	
C.4.a	Akuntabilitas dan Tata Kelola BUMN	1. Analisis kinerja keuangan dan operasional BUMN; 2. Analisis kualitas GRC BUMN; 3. Analisis kualitas aksi korporasi BUMN, termasuk pembentukan <i>holding</i> BUMN dan pemanfaatan aset; 4. Analisis kontribusi BUMN terhadap pembangunan	D4			V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ 3	TRIWULAN			
				I 4	II 5	III 6	IV 7
1		2	3	4	5	6	7
		(pelaksanaan penugasan pemerintah); 5. Analisis kontribusi BUMN terhadap fiskal pemerintah; 6. Potret implementasi ESG pada BUMN; 7. Analisis Kapabilitas SPI BUMN 8. Permasalahan dan hambatan BUMN dalam pelaksanaan bisnis (termasuk implementasi GRC); 9. Rekomendasi perbaikan.					
C.4.b	Akuntabilitas dan Tata Kelola BUMD Air Minum)	1. Analisis kinerja keuangan, operasional, dan keberlanjutan usaha BUMD; 2. Analisis kontribusi BUMD terhadap keuangan dan pembangunan nasional dan daerah (kontribusi fiskal dan kontribusi dalam pembangunan) Analisis kualitas GRC BUMD; 3. Analisis kualitas aksi korporasi BUMD (Kerjasama BUMD dengan Pihak Ketiga) 4. Permasalahan dan hambatan BUMD dalam pelaksanaan bisnis dan implementasi GRC. 5. Rekomendasi perbaikan.	D4			V	
C.4.c	Akuntabilitas dan Tata Kelola BUMD Aneka Usaha	1. Analisis kinerja keuangan, operasional, dan keberlanjutan usaha BUMD; 2. Analisis kontribusi BUMD terhadap keuangan dan pembangunan nasional dan daerah (kontribusi fiskal dan kontribusi dalam pembangunan) Analisis kualitas GRC BUMD; 3. Analisis kualitas aksi korporasi BUMD (Kerjasama BUMD dengan Pihak Ketiga) 4. Permasalahan dan hambatan BUMD dalam pelaksanaan bisnis dan implementasi GRC. 5. Rekomendasi perbaikan.	D4			V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
C.4.d	Akuntabilitas dan Tata Kelola BLU/BLUD Layanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis kebijakan pengelolaan BLU/BLUD Layanan Kesehatan-Rumah Sakit (ketepatan, keselarasan, dan kecukupan). 2. Analisis efektivitas kinerja keuangan dan operasional BLU/BLUD Layanan Kesehatan-Rumah Sakit. 3. Analisis pencapaian tujuan penerapan BLU/BLUD, termasuk kontribusinya terhadap kinerja pelayanan kesehatan 4. Analisis kualitas desain dan efektivitas penerapan tata kelola, pengendalian internal, dan SPI. 5. Analisis kualitas desain dan efektivitas implementasi Manajemen Risiko (termasuk risiko kecurangan) pada BLU/BLUD Layanan Kesehatan-Rumah Sakit. 6. Permasalahan dan hambatan BLU/BLUD dalam mendukung program pemerintah/pemberian layanan. 7. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi. 	D4			V	
C.4.e	Akuntabilitas dan Tata Kelola BLU Pendidikan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis kebijakan pengelolaan BLU Pendidikan Tinggi; 2. Analisis efektivitas kinerja keuangan dan operasional BLU Pendidikan Tinggi; 3. Analisis pencapaian tujuan penerapan BLU, termasuk kontribusinya terhadap program pemerintah terkait pembangunan SDM dan transformasi ekonomi; 4. Analisis kualitas desain dan efektivitas penerapan GRC pada BLU Pendidikan Tinggi; 5. Permasalahan dan hambatan BLU dalam mendukung program pemerintah; 6. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi. 	D4			V	
D	Transformasi Ekonomi	1. Analisis transformasi struktur ekonomi nasional	D1		V		V

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		2. Analisis daya saing ekonomi global 3. Analisis efektivitas implementasi program peningkatan ekspor, pengendalian impor, dan peningkatan investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 4. Analisis efektivitas pengembangan industri dalam negeri dan pemberdayaan UMKM dalam mendorong kemandirian industri dan transformasi ekonomi 5. Simpulan kecukupan, ketepatan, keselarasan kebijakan transformasi ekonomi 6. Identifikasi hambatan dan permasalahan strategis terkait transformasi ekonomi 7. Rekomendasi kebijakan strategis untuk transformasi ekonomi					
D.1	Penguatan Industri Dalam Negeri	1. Analisis ketepatan dan keselarasan bauran kebijakan penguatan industri dalam negeri 2. Analisis tata kelola dan potret penguatan industri dalam negeri 3. Analisis efektivitas kerjasama ekonomi/perdagangan internasional dalam mendorong industri manufaktur dalam negeri 4. Analisis kesiapan dan potret penerapan ekonomi hijau pada industri nasional 5. Analisis dampak penguatan industri dalam mendorong kemandirian industri nasional 6. Analisis dampak penguatan industri dalam pendorong neraca perdagangan yang <i>sustainable</i> dan peningkatan ekonomi nasional	D1		V		V
D.1.a	Hilirisasi Industri Berbasis SDA - Sektor	Triwulan II: A. Sektor Pertambangan dan SDA	D1		V		V

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ 3	TRIWULAN			
				I 4	II 5	III 6	IV 7
1		2					
	Pangan dan Pertambangan	<p>1. Potret dan analisis kesesuaian implementasi hulu hilir dengan kebijakan dukungan industri sektor pertambangan dan SDA</p> <p>2. Analisis hilirisasi industri berbasis SDA dan pertambangan dalam pertumbuhan dan kemandirian industri nasional</p> <p>3. Dampak hilirisasi SDA termasuk dalam aktivitas investasi, produktivitas dan perdagangan internasional</p> <p>4. Analisis risiko, permasalahan dan hambatan dalam keberlanjutan hilirisasi</p> <p>5. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi</p> <p>B. Sektor Pertambangan (nikel, bauksit, tembaga, dan timah):</p> <p>1. Gambaran umum industri tambang nasional (jumlah produksi, sumber produksi (BUMN, Swasta, Impor), termasuk gambaran ketergantungan impor)</p> <p>2. Analisis penetapan harga komoditas tambang nasional (analisis biaya produksi)</p> <p>3. Analisis potensi inefisiensi industri tambang (termasuk produktivitas pabrik)</p> <p>4. Analisis implementasi dan efektivitas reklamasi lahan pasca tambang</p> <p>5. Analisis risiko, permasalahan dan hambatan terkait efisiensi serta rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi industri tambang nasional</p> <p>Triwulan IV:</p>					

SEKTOR/TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
	<p>A. Sektor Pertambangan dan SDA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis kecukupan kebijakan dan grand design hilirisasi industri berbasis SDA yang <i>sustainable</i> termasuk kesesuaian kebijakan hulu hilir 2. Potret dan analisis kesesuaian implementasi hulu hilir dengan kebijakan dukungan industri sektor pertambangan dan SDA 3. Analisis hilirisasi industri berbasis SDA dan pertambangan dalam pertumbuhan dan kemandirian industri nasional 4. Dampak hilirisasi SDA termasuk dalam aktivitas investasi, produktivitas dan perdagangan internasional 5. Analisis risiko, permasalahan dan hambatan dalam keberlanjutan hilirisasi 6. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi <p>B. Sektor Pertambangan (nikel, bauksit, tembaga, dan timah):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gambaran umum industri tambang nasional (jumlah produksi, sumber produksi (BUMN, Swasta, Impor), termasuk gambaran ketergantungan impor) 2. Analisis ketepatan dan <i>sustainability</i> rancangan kebijakan dukungan industri tambang nasional 3. Analisis penetapan harga komoditas tambang nasional (analisis biaya produksi) 4. Analisis potensi inefisiensi industri tambang (termasuk produktivitas pabrik) 5. Analisis implementasi dan efektivitas reklamasi lahan pasca tambang 					

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		6. Analisis risiko, permasalahan dan hambatan terkait efisiensi serta rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi industri tambang nasional					
D.1.b	Kemudahan Berusaha dan Peningkatan Investasi	<p>Triwulan II:</p> <p>A. Kemudahan Berusaha</p> <ol style="list-style-type: none"> Potret OSS di daerah (kesiapan, progres, dan kendala dalam implementasi analisis disparitas antar wilayah; analisis bottleneck) dan positioning OSS dalam mendukung kemudahan berusaha Analisis dampak kemudahan perizinan berusaha terhadap pertumbuhan usaha (UMKM dan Industri) Analisis risiko, hambatan dan permasalahan dalam kemudahan berusaha Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi <p>B. Peningkatan Investasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Analisis akuntabilitas dan potret tata kelola program peningkatan investasi baik di pusat maupun daerah Analisis dampak penguatan investasi dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah Analisis risiko, hambatan dan permasalahan dalam meningkatkan investasi Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi <p>Triwulan IV:</p> <p>A. Kemudahan Berusaha</p> <ol style="list-style-type: none"> Analisis kecukupan dan ketepatan bauran kebijakan kemudahan perizinan berusaha Analisis efektivitas koordinasi kelembagaan lintas 	D1		V		V

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		<p>sektoral terkait kemudahan perizinan berusaha</p> <p>3. Analisis tata kelola OSS dalam mendukung kemudahan perizinan berusaha baik pusat maupun daerah</p> <p>4. Potret OSS di daerah (kesiapan, progres, dan kendala dalam implementasi analisis disparitas antar wilayah; analisis bottleneck) dan positioning OSS dalam mendukung kemudahan berusaha</p> <p>5. Analisis dampak kemudahan perizinan berusaha terhadap pertumbuhan usaha (UMKM dan Industri)</p> <p>6. Analisis risiko, hambatan dan permasalahan dalam kemudahan berusaha</p> <p>7. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi</p> <p>B. Peningkatan Investasi</p> <p>1. Analisis ketepatan dan keselarasan bauran kebijakan optimalisasi investasi pusat dan daerah</p> <p>2. Analisis kelembagaan lintas sektoral terkait peningkatan investasi termasuk keselarasan antar K/L/D</p> <p>3. Analisis akuntabilitas dan potret tata kelola program peningkatan investasi baik di pusat maupun daerah</p> <p>4. Analisis dampak penguatan investasi dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah</p> <p>5. Analisis risiko, hambatan dan permasalahan dalam meningkatkan investasi</p> <p>6. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi</p>					
D.1.c	Pembangunan Smelter dan Kawasan Industri (KI)	<p>1. Analisis kecukupan dan ketepatan kebijakan pembangunan smelter dan kawasan industri</p> <p>2. Analisis efektivitas kelembagaan pembangunan <i>Smelter</i> dan KI, termasuk keberlanjutan pembiayaan</p>	D1		V		

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
1	2	3	I	II	III	IV	
			4	5	6	7	
		<p>pembangunan <i>Smelter</i> dan KI</p> <p>3. Akuntabilitas keuangan dan capaian progres pembangunan <i>Smelter</i> dan KI</p> <p>4. Dampak pembangunan <i>Smelter</i> dan kawasan industri pada sektor industri pengolahan, termasuk analisis produktivitas dan nilai tambah komoditas</p> <p>5. Analisis efektivitas pengembangan <i>Smelter</i> dan KI terhadap keberlanjutan hilirisasi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya</p> <p>6. Analisis risiko, hambatan dan permasalahan pengembangan <i>Smelter</i> dan KI</p> <p>7. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi</p>					
D.2	Peningkatan Daya Saing UMKM	<p>1. Analisis kecukupan dan ketepatan bauran kebijakan peningkatan daya saing UMKM</p> <p>2. Analisis efektivitas koordinasi kelembagaan lintas sektoral (antar K/L/D) dalam peningkatan daya saing UMKM</p> <p>3. Analisis implementasi dan dampak sertifikasi halal bagi UMKM</p> <p>4. Akuntabilitas dan tata kelola basis data tunggal UMKM</p> <p>5. Analisis efektivitas bauran kebijakan dan program peningkatan daya saing UMKM dalam peningkatan kelas UMKM dan pertumbuhan wirausaha</p> <p>6. Analisis Kontribusi sektor UMKM terhadap indikator pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional (PDB, tenaga kerja dan sebagainya)</p>	D1		V		
D.2.a	Penguatan Akses Permodalan dan Pasar	<p>1. Analisis kecukupan dan ketepatan bauran kebijakan penguatan akses permodalan dan pasar</p>	D1		V		

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		2. Akuntabilitas dan tata kelola Implementasi Fasilitas pendampingan akses pasar dan pembiayaan (baik pembiayaan dari perbankan maupun pembiayaan dari program pemerintah) 3. Analisis kontribusi/kinerja BUMN dan BPD dalam menyalurkan pembiayaan bagi UMKM 4. Efektivitas Peningkatan/ perluasan akses pasar (utamanya pasar ekspor) dan kemitraan usaha, serta akses permodalan terhadap peningkatan daya saing UMKM 5. Analisis risiko, permasalahan, dan hambatan penguatan akses permodalan dan pasar 6. Rekomendasi perbaikan					
D.2.b	Penguatan Kewirausahaan dan UMKM	1. Analisis kecukupan dan ketepatan bauran kebijakan penguatan kewirausahaan dan UMKM 2. Analisis Efektivitas koordinasi kelembagaan lintas sektoral (K/L/D) dalam penguatan kewirausahaan dan UMKM 3. Akuntabilitas dan tata kelola implementasi penguatan kewirausahaan dan UMKM antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Formalisasi dan perizinan bentuk usaha mikro - Peningkatan kapasitas pelaku usaha dan nilai tambah produk UMKM - Modernisasi dan pengembangan UMKM digital - Optimalisasi layanan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) UMKM - Pengembangan wirausaha tematik (di antaranya wirausaha sosial, perempuan, dan disabilitas) - Pengelolaan UMKM terpadu berbasis wilayah dan 	D1		V		

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
1	2			3	I 4	II 5	III 6
		komoditas 4. Analisis efektivitas dan dampak bauran program penguatan kewirausahaan dan UMKM 5. Permasalahan dan hambatan penguatan kewirausahaan dan UMKM 6. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi					
D.3	Penguatan Daya Saing Pariwisata Nasional	1. Analisis Konvergensi kebijakan dan program lintas sektoral penguatan daya saing pariwisata pusat dan daerah 2. Analisis dampak penguatan daya saing pariwisata nasional dalam menarik wisatawan mancanegara berkualitas (<i>quality tourism</i>) 3. Analisis dampak penguatan daya saing pariwisata terhadap peningkatan ekonomi daerah dan nasional (PDB, devisa, investasi, penyerapan tenaga kerja, dan sebagainya.) 4. Analisis dampak penguatan daya saing pariwisata nasional pada level internasional	D1		V		
D.3.a	Pembangunan Infrastruktur Pariwisata Nasional (DPSP, DPP, KEK Pariwisata)	1. Analisis kecukupan dan ketepatan bauran kebijakan pembangunan infrastruktur pariwisata nasional 2. Analisis keselarasan perencanaan/desain pembangunan infrastruktur destinasi pariwisata di pusat dan daerah 3. Akuntabilitas keuangan dan progres capaian pembangunan kawasan pariwisata 4. Analisis kecukupan aksesibilitas/amenitas kawasan pariwisata (jalan, jembatan, hunian, dan sebagainya) 5. Analisis Efektivitas dan dampak Pembangunan Infrastruktur Pariwisata Nasional dalam peningkatan aktivitas pariwisata dan perekonomian	D1		V		

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		6. Analisis risiko, Permasalahan, dan hambatan pembangunan infrastruktur Pariwisata nasional 7. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi					
D.3.b	Dukungan Pengembangan Pariwisata	1. Analisis kecukupan dan ketepatan bauran kebijakan dukungan pengembangan pariwisata 2. Akuntabilitas dan tata kelola implementasi dukungan pengembangan pariwisata antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Pemasaran <i>Wonderful</i> Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI); - Peningkatan ragam dan kualitas usaha industri dan rantai pasok destinasi pariwisata; - Penerapan pariwisata halal; - Integrasi pola perjalanan di destinasi yang terintegrasi dengan penyelenggaraan event dan MICE (<i>Meetings, incentives, conferences and exhibitions</i>); dan - Kemudahan pembuatan visa dan berwisata di Indonesia. 3. Akuntabilitas dan tata kelola implementasi penguatan desa wisata (penguatan narasi, peningkatan kapasitas SDM, dan diversifikasi produk dan layanan), termasuk: <ul style="list-style-type: none"> - Analisis kebijakan terkait pariwisata desa (ketepatan, keselarasan, dan kecukupan) - Potret pariwisata desa (analisis sebaran berdasarkan jenis, perkembangan) - Analisis peran K/L dan supradesa dalam peningkatan pariwisata desa - Praktik baik peningkatan pariwisata desa - Hambatan terkait peningkatan pariwisata desa 4. Akuntabilitas dan Efektivitas peran Pemda dalam	D1		V		

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		<p>mendukung pengembangan pariwisata nasional</p> <p>5. Analisis efektivitas dan dampak dukungan pengembangan pariwisata dalam menarik wisatawan dan peningkatan perekonomian</p> <p>6. Analisis risiko, permasalahan, dan hambatan dukungan pengembangan pariwisata</p> <p>7. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi</p>					
E	Ketahanan Pangan	<p>1. Potret ketahanan pangan (antara lain mencakup gambaran pemenuhan kebutuhan pangan nasional, analisis regional, perkembangan diversifikasi pangan, kecukupan dan kelancaran distribusi pangan, dan seterusnya);</p> <p>2. Analisis ketepatan kebijakan/<i>grand design</i> peningkatan ketahanan pangan nasional, termasuk keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah;</p> <p>3. Analisis kesesuaian prioritas alokasi anggaran belanja pemerintah (pusat dan daerah) dengan strategi peningkatan ketahanan pangan;</p> <p>4. Analisis kualitas dan integrasi data Sektor Pangan</p> <p>5. Analisis efektivitas pelaksanaan program pemerintah dalam mendorong peningkatan ketahanan pangan</p> <p>Pengawasan sektor ketahanan pangan dilaksanakan sekurang-kurangnya atas 14 komoditas pangan, yaitu: Beras, Terigu, Jagung, Kedelai, Cabe, Bawang Merah, Bawang Putih, Minyak Goreng, Gula, Telur Ayam, Daging Ayam Ras, Daging Sapi, Ikan, Garam</p>	D5			V	
E.1	Peningkatan Produksi Pangan (On Farm)	<p>1. Gambaran umum kebutuhan, produksi dan sebaran wilayah atas 14 komoditas pangan;</p>	D5			V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ 3	TRIWULAN			
1	2			I 4	II 5	III 6	IV 7
		2. Analisis ketepatan dan <i>sustainability</i> rancangan bauran kebijakan peningkatan produksi pangan; 3. Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan kebijakan; 4. Simpulan efektivitas peningkatan produksi dan produktivitas 14 komoditas pangan; 5. Risiko yang belum termitigasi; 6. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi -(Komoditas Prioritas (paling krusial) yang menjadi perhatian Presiden: Beras, bawang putih, telur ayam, daging ayam, minyak goreng, kedelai					
E.1.a	Tata Kelola Lahan Pertanian Nasional	1. Gambaran umum pemanfaatan lahan pertanian (luas lahan, luas lahan produktif dan sebaran per wilayah dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya); 2. Analisis ketepatan dan <i>sustainability</i> rancangan kebijakan pemanfaatan lahan pertanian; 3. Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan kebijakan; 4. Keselarasan rancangan dan implementasi kebijakan antara pusat dan daerah; 5. Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program; 6. Risiko yang belum termitigasi; 7. Simpulan efektivitas pelaksanaan program; 8. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	D5			V	
E.1.b	Tata Kelola Program Bibit dan Benih Unggul	1. Gambaran umum kecukupan pemenuhan bibit dan benih nasional (kebutuhan, produksi, impor dan sebaran per wilayah); 2. Analisis ketepatan dan <i>sustainability</i> rancangan	D5			V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendai PJ 3	TRIWULAN			
				I 4	II 5	III 6	IV 7
1		2					
		<p>kebijakan program bibit dan benih unggul;</p> <p>3. Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan kebijakan;</p> <p>4. Keselarasan rancangan dan implementasi kebijakan antara pusat dan daerah;</p> <p>5. Akuntabilitas keuangan dan kinerja (termasuk ketepatan sasaran, waktu, kualitas, jenis, dan administrasi);</p> <p>6. Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program;</p> <p>7. Risiko yang belum termitigasi;</p> <p>8. Simpulan efektivitas pelaksanaan program;</p> <p>9. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi</p> <p>Peran BUMN dalam Tata Kelola Program Bibit dan Benih Unggul</p> <p>1. Peta BUMN dalam ketahanan pangan</p> <p>2. Analisis ketercapaian penugasan pemerintah oleh BUMN</p> <p>3. Analisis potensi produksi BUMN dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri.</p> <p>4. Analisis daya saing produk BUMN terhadap produk impor.</p>					
E.1.c	Tata Kelola Pupuk Nasional	<p>1. Gambaran umum kecukupan pemenuhan pupuk nasional (kebutuhan, produksi, surplus/defisit, ekspor/impor dan sebaran per wilayah);</p> <p>2. Analisis ketepatan dan <i>sustainability</i> rancangan kebijakan pemenuhan kebutuhan pupuk nasional;</p> <p>3. Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan kebijakan pupuk nasional;</p> <p>4. Tata kelola distribusi pupuk nasional (termasuk</p>	D5			V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		<p>ketersediaan dan keterjangkauan per wilayah);</p> <p>5. Ketepatan penetapan alokasi pupuk bersubsidi;</p> <p>6. Ketepatan tata kelola distribusi pupuk bersubsidi (ketepatan sasaran, waktu, dan jumlah serta mekanisme pengawasan);</p> <p>7. Risiko yang belum termitigasi;</p> <p>8. Simpulan efektivitas kebijakan pemenuhan pupuk nasional terhadap produktivitas pangan;</p> <p>9. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi</p> <p>Peran BUMN dalam Tata Kelola Pupuk Nasional</p> <p>1. Peta BUMN dalam ketahanan pangan</p> <p>2. Analisis ketercapaian penugasan pemerintah oleh BUMN</p> <p>3. Analisis potensi produksi BUMN dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri.</p> <p>4. Analisis daya saing produk BUMN terhadap produk impor.</p>					
E.1.d	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	<p>1. Gambaran umum kecukupan pemenuhan pakan ternak nasional (kebutuhan, produksi, impor dan sebaran per wilayah);</p> <p>2. Analisis ketepatan dan <i>sustainability</i> rancangan kebijakan produksi pakan ternak;</p> <p>3. Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan kebijakan;</p> <p>4. Analisis keterjangkauan harga pakan ternak dan permasalahannya;</p> <p>5. Keselarasan rancangan dan implementasi kebijakan antara pusat dan daerah;</p> <p>6. Permasalahan dan hambatan pelaksanaan kebijakan</p>	D5			V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ 3	TRIWULAN			
				I 4	II 5	III 6	IV 7
1		2					
		<p>memenuhi kebutuhan pakan;</p> <p>7. Risiko yang belum termitigasi;</p> <p>8. Simpulan efektivitas produksi pakan terhadap kebutuhan pakan;</p> <p>9. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi</p>					
E.1.e	Peningkatan Infrastruktur Pangan Nasional	<p>1. Gambaran alokasi belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur pangan;</p> <p>2. Potret sebaran dan kondisi infrastruktur pangan (analisis regional);</p> <p>3. Akuntabilitas keuangan dan progres kinerja pembangunan infrastruktur pangan (termasuk ketepatan sasaran, waktu, kualitas, jenis, dan administrasi);</p> <p>4. Analisis efektivitas pembangunan infrastruktur pangan dalam mendorong peningkatan produksi pangan;</p> <p>5. Hambatan dan permasalahan dalam pembangunan infrastruktur pangan;</p> <p>6. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi</p>	D5			V	
E.1.f	Peningkatan Dukungan Peralatan Produksi Pangan	<p>1. Gambaran umum kecukupan dukungan peralatan produksi pangan (kebutuhan dan penyaluran);</p> <p>2. Analisis ketepatan dan <i>sustainability</i> rancangan bauran kebijakan dukungan peralatan produksi pangan;</p> <p>3. Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan kebijakan;</p> <p>4. Analisis pemanfaatan teknologi pangan dalam dukungan peralatan produksi pangan;</p> <p>5. Akuntabilitas keuangan dan kinerja (termasuk ketepatan sasaran, waktu, kualitas, jenis, dan administrasi);</p>	D5			V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		6. Tata kelola penyaluran solar bersubsidi (bagi nelayan); 7. Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program; 8. Risiko yang belum termitigasi; 9. Analisis efektivitas kebijakan dukungan peralatan produksi pangan dalam meningkatkan produksi pangan; 10. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi					
E.1.g	Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Petani dan Nelayan	1. Analisis ketepatan rancangan bauran kebijakan dalam meningkatkan kapasitas dan kelembagaan petani dan nelayan (termasuk akses permodalan, penyuluh pertanian, koperasi, kelompok tani dan nelayan, bantuan sosial, dan seterusnya); 2. Analisis kesesuaian implementasi kebijakan dengan rancangan kebijakan; 3. Analisis efektivitas bauran kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kapasitas dan kelembagaan petani dan nelayan; 4. Analisis efektivitas bauran kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani; 5. Permasalahan dan hambatan; 6. Risiko yang belum termitigasi; 7. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	D5			V	
E.1.h	Penanggulangan Hama dan Penyakit	1. Analisis ketepatan rancangan bauran kebijakan penanggulangan hama dan penyakit; 2. Analisis kesesuaian implementasi kebijakan dengan rancangan kebijakan; 3. Simpulan efektivitas bauran kebijakan pemerintah dalam penanggulangan hama dan penyakit; 4. Permasalahan dan hambatan;	D5			V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		5. Risiko yang belum termitigasi; 6. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi					
E.2	Keterjangkauan dan Ketersediaan Pangan (<i>Off Farm</i>)	1. Gambaran umum ketersediaan, stabilitas harga dan sebaran wilayah atas 14 komoditas pangan; 2. Analisis ketepatan dan <i>sustainability</i> rancangan bauran kebijakan keterjangkauan dan ketersediaan pangan; 3. Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan kebijakan; 4. Simpulan efektivitas ketersediaan dan stabilitas harga atas 14 komoditas pangan; 5. Risiko yang belum termitigasi; 6. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	D5			V	
E.2.a	Penanganan Pasca Panen	1. Analisis ketepatan rancangan bauran kebijakan dalam meningkatkan kemampuan penanganan pasca panen; 2. Analisis kesesuaian implementasi kebijakan dengan rancangan kebijakan; 3. Analisis pemanfaatan teknologi pertanian dalam penanganan pasca panen; 4. Simpulan efektivitas bauran kebijakan penanganan pasca panen dalam meningkatkan kualitas hasil produksi pangan; 5. Permasalahan dan hambatan; 6. Risiko yang belum termitigasi; 7. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	D5			V	
E.2.b	Hilirisasi Industri Pangan atas 14 Komoditas	Hilirisasi Industri Pangan: 1. Analisis ketepatan kebijakan Hilirisasi Industri Pangan 2. Potret implementasi Hilirisasi Industri Pangan 3. Analisis keberadaan pohon industri dan pemutakhiran dengan kondisi terkini	D5			V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Analisis pemetaan potensi pohon industri komoditas terhadap potensi pasar 5. Analisis kesiapan pendukung hilirisasi industri pangan (teknologi, SDM, sarana prasarana, standarisasi produk) 6. Analisis kemudahan akses pembiayaan dan kemudahan berusaha 7. <i>Progress</i> pelaksanaan hilirisasi industri pangan 8. Efektivitas pelaksanaan hilirisasi industri pangan 9. Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program 10. Risiko yang belum termitigasi 11. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi 					
E.2.c	<p><i>Supply Chain</i> Komoditas Pangan dari Hulu ke Hilir (14 Komoditas)</p> <p>TW I Beras, Terigu, Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabe</p> <p>TW II Jagung, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, Telur ayam,</p> <p>TW III Minyak Goreng, Ikan, Garam, Gula</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis ketepatan rancangan bauran kebijakan dalam memastikan kelancaran <i>supply chain</i> komoditas pangan (termasuk distribusi dan tata niaga); 2. Analisis kesesuaian implementasi kebijakan dengan rancangan kebijakan; 3. Simpulan efektivitas bauran kebijakan pemerintah dalam memastikan kelancaran <i>supply chain</i> komoditas pangan; 4. Analisis dampak panjang <i>supply chain</i> terhadap harga dan ketersediaan komoditas pangan; 5. Permasalahan dan hambatan; 6. Risiko yang belum termitigasi; 7. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi 	D5	V	V	V	
E.2.d	Kebijakan Stabilisasi Harga	<p>Triwulan I, II, III, IV:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan harga pasar terhadap HET atas 14 komoditas (pergerakan harga). 	D5	V	V	V	V

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
1	2	3	I 4	II 5	III 6	IV 7	
		<p>2. Analisis Neraca Komoditas, serta stok dan ketersediaan komoditas di pasar. (pendalaman atas kondisi abnormal pada suatu komoditas)</p> <p>Triwulan III:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gambaran umum kebutuhan, produksi dan sebaran wilayah atas 14 komoditas pangan; 2. Analisis ketepatan rancangan bauran kebijakan stabilisasi harga komoditas pangan; 3. Analisis kesesuaian implementasi kebijakan dengan rancangan kebijakan; 4. Simpulan efektivitas bauran kebijakan stabilisasi harga komoditas pangan; 5. Permasalahan dan hambatan; 6. Risiko yang belum termitigasi; 7. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi 					
E.2.e	Kebijakan Ekspor/Impor Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis ketepatan rancangan bauran kebijakan ekspor/impor komoditas pangan (kebutuhan, produksi, defisit/surplus, penetapan kuota, realisasi) 2. Analisis kesesuaian implementasi kebijakan dengan rancangan kebijakan 3. Simpulan efektivitas bauran kebijakan ekspor/impor dalam menjaga harga dan ketersediaan komoditas pangan 4. Permasalahan dan hambatan 5. Risiko yang belum termitigasi 6. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi. 	D5			V	
E.3	Resiliensi Cadangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gambaran umum cadangan pangan dan sebaran 	D5			V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
1	2	3	I 4	II 5	III 6	IV 7	
	Pangan Nasional	wilayah atas 14 komoditas pangan 2. Analisis ketepatan dan <i>sustainability</i> rancangan bauran kebijakan cadangan pangan 3. Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan kebijakan 4. Analisis efektivitas kebijakan cadangan pangan dalam mendukung resiliensi cadangan pangan nasional; 5. Analisis efektivitas kebijakan kawasan sentra produksi pangan dalam mendukung resiliensi cadangan pangan nasional 6. Analisis efisiensi industri pupuk dalam mendukung resiliensi produksi pangan nasional 7. Risiko yang belum termitigasi 8. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi					
E.3.a	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah	Level Pemerintah Pusat: 1. Analisis ketepatan bauran kebijakan pemenuhan cadangan pangan pemerintah pusat dan daerah atas 14 komoditas; 2. Analisis ketepatan perencanaan kebutuhan cadangan pangan pusat dan daerah (termasuk basis data yang digunakan, keselarasan perkiraan dengan kebutuhan riil, dan seterusnya); 3. Akuntabilitas kinerja dan keuangan pengelolaan cadangan pangan (termasuk pembelian, penyimpanan, distribusi); 4. Analisis kinerja pengelolaan cadangan pangan dalam menjaga stabilitas harga komoditas; 5. Simpulan atas efektivitas pelaksanaan program; 6. Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program;	D5			V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		<p>7. Risiko yang belum termitigasi; 8. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.</p> <p>Level Pemerintah Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis ketepatan kebijakan pemenuhan cadangan pangan pemerintah daerah atas 14 komoditas pangan; 2. Analisis ketepatan perencanaan kebutuhan cadangan pangan (termasuk basis data yang digunakan, keselarasan perkiraan dengan kebutuhan riil, dan seterusnya); 3. Akuntabilitas kinerja dan keuangan pengelolaan cadangan pangan daerah (termasuk pembelian, penyimpanan, distribusi); 4. Analisis kinerja pengelolaan cadangan pangan dalam menjaga stabilitas harga komoditas; 5. Simpulan atas efektivitas pelaksanaan program; 6. Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program; 7. Risiko yang belum termitigasi; 8. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi. <p>Peran BUMN dalam Tata Kelola Cadangan Pangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peta BUMN dalam ketahanan pangan 2. Analisis ketercapaian penugasan pemerintah oleh BUMN 3. Analisis potensi. 					
E.3.b	Efisiensi Industri Pupuk Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gambaran umum industri pupuk nasional (jumlah produksi, sumber produksi (BUMN, Swasta, Impor), dan jenis pupuk); 2. Analisis ketepatan dan <i>sustainability</i> rancangan kebijakan dukungan industri pupuk nasional; 	D5	V			

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan kebijakan dukungan industri pupuk nasional; 4. Analisis penetapan harga pupuk nasional (analisis biaya produksi pupuk BUMN); 5. Analisis potensi inefisiensi industri pupuk (termasuk produktivitas pabrik dan efektivitas subsidi/kompensasi bagi produsen pupuk); 6. Ketepatan penetapan harga pupuk bersubsidi (dihubungkan dengan analisis potensi inefisiensi industri); 7. Ketepatan perhitungan realisasi belanja subsidi dan pembayaran kompensasi terkait industri pupuk; 8. Permasalahan dan hambatan terkait efisiensi industri pupuk nasional; 9. Simpulan efisiensi industri pupuk nasional (termasuk ketepatan harga dan potensi produktivitas); 10. Risiko yang belum termitigasi; 11. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi 					
F	Pembangunan Energi Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpulan efektivitas penyelenggaraan pembangunan energi berkelanjutan 2. Analisis kecukupan dan ketepatan kebijakan pembangunan energi berkelanjutan 3. Kecukupan pemantauan, pengendalian, dan pemutakhiran kebijakan 4. Identifikasi ruang perbaikan kebijakan pembangunan energi berkelanjutan 	D1		V		V
F.1	Pengembangan Akses Energi Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecukupan, ketepatan, dan keselarasan kebijakan dalam penyediaan dan pemerataan akses energi yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan. 	D1		V		

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		2. Analisis atas aksesibilitas energi nasional untuk komoditas listrik, BBM, dan gas. 3. Analisis atas efektivitas penguatan pendanaan dalam meningkatkan pemerataan infrastruktur dan akses energi.					
F.1.a	Ketersediaan dan Keandalan Energi	1. Analisis atas bauran kebijakan dan perencanaan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional 2. Analisis atas strategi pengelolaan energi primer untuk pemenuhan kebutuhan energi nasional 3. Analisis atas ketersediaan dan keandalan energi per wilayah 4. Analisis atas ketepatan strategi pembangunan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan energi nasional 5. Analisis kecukupan dan ketepatan kebijakan terkait ekspor-impor energi dalam rangka penguatan ketahanan energi 6. Analisis risiko <i>fraud</i> . 7. Rekomendasi perbaikan	D1		V		
F.1.b	Distribusi dan Kemerataan Energi	1. Potret kondisi pelayanan dan penyediaan energi untuk konsumen (masyarakat, industri, transportasi, dll). 2. Analisis ketimpangan distribusi energi per wilayah. 3. Analisis ketepatan pembangunan infrastruktur penunjang distribusi dengan potensi sumber daya dan pertumbuhan kebutuhan energi. 4. Analisis risiko <i>fraud</i> . 5. Rekomendasi perbaikan distribusi dan peningkatan pemerataan energi.	D4		V		

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
F.1.c	Keterjangkauan Energi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis kecukupan dan ketepatan kebijakan penetapan harga energi. 2. Analisis atas kewajaran pembentukan harga pokok produksi energi. 3. Identifikasi komponen pembentuk harga energi yang dapat diefisienkan. 4. Evaluasi atas akuntabilitas transformasi subsidi energi 5. Analisis risiko kecurangan (<i>fraud</i>) 6. Rekomendasi perbaikan 	D1		V		
F.2	Transformasi Energi Hijau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecukupan ketepatan, dan keselarasan bauran kebijakan terkait kesiapan menuju transformasi energi hijau. 2. Identifikasi upaya percepatan yang diperlukan menuju transformasi energi hijau. 	D1		V		V
F.2.a	Diversifikasi Energi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis kecukupan, ketepatan dan keselarasan kebijakan diversifikasi energi menuju energi hijau (terutama kebijakan mengenai bauran energi primer). 2. Potret ketercapaian pemenuhan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi nasional. 3. Kepatuhan implementasi kebijakan transisi menuju energi hijau. 4. Identifikasi hambatan utama transisi energi fosil ke energi baru terbarukan 5. Analisis risiko <i>fraud</i>. 6. Rekomendasi perbaikan. 	D1		V		V
F.2.b	Transisi Menuju Pembangunan Rendah Karbon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis atas kecukupan, ketepatan, dan keselarasan kebijakan <i>phase-out</i> energi fosil menuju target <i>net-zero emission</i>. 2. Analisis atas akuntabilitas dan efektivitas kebijakan 	D1		V		V

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		<p>phase-out PLTU Batubara.</p> <p>3. Analisis atas pemanfaatan teknologi energi batu bara yang ramah lingkungan dan efisiensi tinggi.</p> <p>4. Analisis risiko kecurangan (<i>fraud</i>).</p> <p>5. Rekomendasi perbaikan.</p>					
F.2.c	Pendanaan Transisi Energi	<p>1. Analisis atas kecukupan, ketepatan, dan keselarasan kebijakan pendanaan dan pembiayaan kreatif untuk percepatan transformasi energi hijau.</p> <p>2. Potret <i>grand design</i> dan bauran pendanaan transisi energi</p> <p>3. Analisis atas akuntabilitas dan efektivitas pendanaan transisi menuju energi rendah karbon, termasuk pendanaan dari kerja sama bilateral dan multilateral</p> <p>4. Rekomendasi perbaikan.</p>	D1		V		V
F.3	Konservasi Energi	<p>1. Analisis kecukupan, ketepatan, dan keselarasan kebijakan konservasi energi pada sisi hulu.</p> <p>2. Analisis ketepatan dan implementasi kebijakan pemanfaatan sumber daya energi di pusat dan daerah dalam rangka konservasi energi dan menjaga ketahanan energi nasional.</p> <p>3. Analisis kepatuhan dan efektivitas implementasi konservasi energi.</p> <p>4. Rekomendasi perbaikan.</p>	D1	V			
F.3.a	Konservasi Energi	<p>1. Analisis kecukupan, ketepatan, dan keselarasan kebijakan konservasi energi pada sisi hulu.</p> <p>2. Analisis ketepatan dan implementasi kebijakan pemanfaatan sumber daya energi di pusat dan daerah dalam rangka konservasi energi dan menjaga ketahanan energi nasional.</p>	D1	V			

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		3. Analisis kepatuhan dan efektivitas implementasi konservasi energi. 4. Rekomendasi perbaikan.					
F.4	Penyelenggaraan Pembangunan Sektor Energi Melalui BUMN	1. Analisis atas efektivitas penyelenggaraan pembangunan sektor energi oleh BUMN, termasuk sinergi antar BUMN. 2. Evaluasi atas akuntabilitas pembangunan major project sektor energi oleh BUMN. 3. Analisis atas efisiensi penyelenggaraan pembangunan sektor energi oleh BUMN. 4. Analisis risiko <i>fraud</i> . 5. Rekomendasi atas perbaikan tata kelola penyelenggaraan pembangunan sektor energi melalui BUMN.	D4		V		
F.4.a	Penyelenggaraan Pembangunan Sektor Energi Melalui BUMN	6. Analisis atas efektivitas penyelenggaraan pembangunan sektor energi oleh BUMN, termasuk sinergi antar BUMN. 7. Evaluasi atas akuntabilitas pembangunan major project sektor energi oleh BUMN. 8. Analisis atas efisiensi penyelenggaraan pembangunan sektor energi oleh BUMN. 9. Analisis risiko <i>fraud</i> . 10. Rekomendasi atas perbaikan tata kelola penyelenggaraan pembangunan sektor energi melalui BUMN.	D4		V		
G	Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	1. Analisis kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dalam perspektif tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian kecurangan dalam mendukung kinerja instansi pemerintah dan tujuan pembangunan nasional. 2. Isu aktual, hambatan, dan permasalahan	D3				V

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		<p>penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan ber0073ih dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional.</p> <p>3. Strategi keberlanjutan penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.</p>					
G.1	Penguatan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian	<p>1. Potret kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian kecurangan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.</p> <p>2. Analisis keterkaitan kapabilitas APIP terhadap kualitas penyelenggaraan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian kecurangan.</p> <p>3. Grand design peningkatan kapabilitas APIP serta perbaikan kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian kecura</p>	D3				V
G.1.a	SPIP Terintegrasi	<p>Triwulan I:</p> <p>1. Analisis daya ungkit dan keberhasilan implementasi pengendalian intern Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam perspektif efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan.</p> <p>2. Potret dan analisis ketercapaian maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.</p> <p>Triwulan IV:</p> <p>1. Potret dan analisis ketercapaian maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.</p>	D3	V			V

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		2. Analisis kualitas penetapan tujuan dan pembangunan infrastruktur pengendalian pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. 3. Identifikasi isu aktual, hambatan, dan peta permasalahan penyelenggaraan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. 4. Area perbaikan dan rekomendasi peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian.					
G.1.b	Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN)	Triwulan I: 1. Analisis atas ketepatan dan kecukupan desain serta kebijakan MRPN lintas sektor. 2. Analisis keselarasan penjabaran pengelolaan risiko program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan lintas sektor ke dalam pengelolaan risiko level entitas (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha). Triwulan IV: 1. Analisis efektivitas penerapan kebijakan MRPN lintas sektor. 2. Identifikasi isu aktual, hambatan, dan peta permasalahan pengelolaan risiko program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan lintas sektor. 3. Area perbaikan dan rekomendasi peningkatan pengelolaan risiko program strategis nasional lintas sektor.	D5		V		V
G.1.c	Pengendalian Kecurangan	1. Profil keterjadian kasus kecurangan dan perhitungan penyelamatan keuangan negara.	D5	V	V	V	V

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Analisis efektivitas implementasi kegiatan pengendalian kecurangan terhadap tren dan jumlah keterjadian kecurangan. 3. Analisis keselarasan dan kecukupan kebijakan dan kelembagaan anti korupsi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, termasuk keberadaan dan keberfungsian <i>whistleblowing system</i> dan partisipasi publik dalam pencegahan kecurangan. 4. Identifikasi dan analisis profil risiko kecurangan (<i>fraud</i>) pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. 5. Analisis ketepatan dan kecukupan upaya pencegahan dan mitigasi kecurangan. 6. Identifikasi isu aktual, hambatan, dan peta permasalahan pengendalian kecurangan dan hambatan kelancaran pembangunan. 7. Area perbaikan dan rekomendasi pengendalian kecurangan dari perspektif pencegahan, deteksi, dan respons. 					
G.1.d	Kapabilitas APIP	<p>Triwulan I :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis daya ungkit dan keberhasilan pembinaan kapabilitas APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam perspektif ketaatan, efektivitas, efisiensi; manajemen risiko dan sistem peringatan dini, serta perbaikan tata kelola. 2. Potret dan analisis ketercapaian kapabilitas APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. <p>Triwulan IV:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Potret dan analisis ketercapaian kapabilitas APIP 	D3	V			V

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		1. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. 2. Analisis kualitas pemenuhan dukungan pengawasan serta penyelenggaraan aktivitas pengawasan pada APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. 3. Identifikasi isu aktual, hambatan, dan peta permasalahan peningkatan kapabilitas APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. 4. Area perbaikan dan rekomendasi peningkatan kapabilitas APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.					
G.2	Pengawasan Akuntabilitas dan Tata Kelola Tematik	1. Identifikasi dan sintesis permasalahan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian kecurangan pembangunan. 2. Analisis keselarasan, kecukupan, ketepatan kebijakan, kelembagaan dan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan. 3. Analisis kualitas akuntabilitas dan tata kelola.	D2				V
G.2.a	Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua dan Papua Barat	1. Analisis keselarasan, ketepatan, dan kecukupan bauran kebijakan Pengembangan DOB Papua dan Papua Barat. 2. Analisis hubungan dan koordinasi kelembagaan lintas sektor Pengembangan DOB Papua dan Papua Barat. 3. Analisis perencanaan dan penganggaran Pengembangan DOB Papua dan Papua Barat. 4. Analisis grand design Pengembangan DOB Papua dan Papua Barat. 5. Identifikasi dan analisis profil risiko (termasuk risiko <i>fraud</i>) berdasarkan proses bisnis dan hubungan kelembagaan Pengembangan DOB Papua dan Papua Barat.	D3		V		

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		<p>6. <i>Monitoring</i> capaian progres dan kesiapan infrastruktur utama dan pendukung penyelenggaraan pemerintahan DOB.</p> <p>7. Analisis kesiapan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.</p> <p>8. Akuntabilitas tata kelola penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan.</p> <p>9. Identifikasi hambatan dan permasalahan tata kelola penanggulangan bencana.</p> <p>10. Rekomendasi kebijakan strategis.</p>					
G.2.b	Penanggulangan Bencana	<p>1. Analisis keselarasan, ketepatan, kecukupan kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, darurat, dan pascabencana (Nasional dan Daerah).</p> <p>2. Analisis perencanaan pendanaan (termasuk Dana Siap Pakai/DSP), infrastruktur (sarana prasarana), dan logistik penanggulangan bencana (Nasional dan Daerah).</p> <p>3. Identifikasi dan analisis profil risiko (termasuk risiko <i>fraud</i>) berdasarkan proses bisnis dan hubungan kelembagaan penanggulangan bencana (Nasional dan Daerah).</p> <p>4. Analisis skema adaptif kebencanaan</p> <p>a. Skema Pendidikan Adaptif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesiapan dan kecukupan fasilitas untuk mendukung resiliensi pendidikan - Kesiapan dan kecukupan tenaga pendidik - Desain kurikulum yang adaptif <p>b. Skema Kesehatan Adaptif</p>	D2			V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> - Keselarasan kebijakan ketahanan kesehatan - Kesiapan, kecukupan, dan mobilisasi fasilitas kesehatan - Kesiapan, kecukupan, dan mobilisasi tenaga kesehatan - Kesiapan, kecukupan, dan mobilisasi alat material kesehatan dan obat/vaksin c. Skema Perlindungan Sosial Adaptif <ul style="list-style-type: none"> - Keselarasan kebijakan perlindungan sosial adaptif - Kesiapan dan kecukupan logistik bantuan dan peralatan - Mekanisme pendataan penerima bantuan dan penyaluran 5. Akuntabilitas tata kelola penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan. 6. Identifikasi hambatan dan permasalahan tata kelola penanggulangan bencana. 7. Rekomendasi kebijakan strategis. 					
G.2.c	Pekan Olah Raga Nasional XXI dan Pekan Paralimpik Nasional XVII Tahun 2024	Triwulan I: 1. Analisis perencanaan dan penganggaran PON XXI dan PEPARNAS XVII 2. Identifikasi dan analisis profil risiko (termasuk risiko <i>fraud</i>) berdasarkan proses bisnis dan hubungan kelembagaan penyelenggaraan PON XXI dan PEPARNAS XVII 3. <i>Monitoring</i> capaian dan progres kesiapan sarana/prasarana utama dan pendukung penyelenggaraan PON XXI dan PEPARNAS XVII	D2	V	V		V

SEKTOR/TEMA/TOPIK 1	INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK 2	Rendal PJ 3	TRIWULAN			
			I 4	II 5	III 6	IV 7
	<p>Triwulan II:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Monitoring capaian dan progres kesiapan sarana/prasarana utama dan pendukung penyelenggaraan PON XXI dan PEPARNAS XVII <p>Triwulan IV:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Akuntabilitas tata kelola penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan2. Analisis strategi, kebijakan, dan desain pengelolaan dan pemanfaatan aset pasca penyelenggaraan PON XXI dan PEPARNAS XVII3. Identifikasi hambatan dan permasalahan tata kelola penyelenggaraan PON XXI dan PEPARNAS XVII4. Rekomendasi kebijakan strategis.					

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN,



MUHAMMAD YUSUF ATEH